43145.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KRAYAN KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

HELMI PUDAASLIKAR

NIM. 500895629

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Nunukan, Agustus 2018

Yang menyatakan

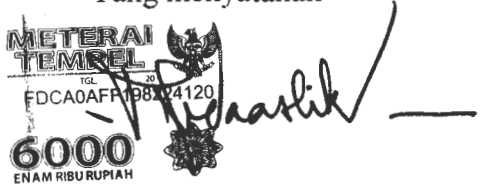

Helmi Pudaaslikar
NIM. 500895629

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43145.pdf

DEVELOPMENT STRATEGY OF BORDER REGIONS IN THE IMPROVEMENT OF PUBLIC WELFARE IN THE NUNUKAN REGENCY NORTH KALIMANTAN PROVINCE

Helmi Pudaaslikar
hpudaaslikar@gmail.com

ABSTRACT

The Indonesia - Malaysia border region of Krayan is identical with its limitations and alienation. The community lives with facilities of infrastructure and public administration services that are far from the word worthy. Air transport as the only access to Krayan is inadequate. The road condition is badly damaged and lack of bridge construction. Telecommunication infrastructure, education, health, government, clean water and electricity are also very minimum. The economic welfare of the people at the border is still depending on the country of Malaysia. Border area pontentials such as agriculture, plantations, forestry, tourism, has not been managed optimally. This research describes and analyzes border area development strategy in community welfare improvement in Krayan regions of Nunukan Regency. The research method used is qualitative descriptive approach, by conducting interviews to informants and direct observation. Methods of data collection using multiple sources of evidence (triangulation) by combining various data collection techniques and existing data sources. Data analysis technique using spradley model by doing analysis from geographical perspective, governance, population and manpower, infrastructure and transportation, agriculture, spatial, and strategic function of Krayan regions. The results show that the development of border areas in Krayan has not been evenly distributed. The low availability and low quality of road, bridge, health, education, electricity and telecommunication infrastructure so that people at the border are still very dependent on existing facilities in neighboring countries. Not synchronous and synergistic policy and development agenda in the Krayan border area both at the regional and central levels so that the maximum development of border areas in Krayan.It is necessary to encourage the development of economic growth centers in several Krayan-based border areas through the development of organic agricultural technoparks, basic infrastructure, building State Boundary Posts, establishing the Krayan District DOB, asymmetric decentralization policy, and local regulation or master plan for the development of the Krayan border region.

Keywords: Strategy, regional development, border, community welfare, Krayan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43145.pdf

STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KRAYAN KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Helmi Pudaaslikar
hpudaaslikar@gmail.com

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

ABSTRAK

Wilayah perbatasan darat Indonesia – Malaysia di Krayan identik dengan keterbatasan dan keterasingan. Masyarakat hidup dengan infrastruktur serta layanan administrasi publik yang jauh dari kata layak. Transportasi udara sebagai satu-satunya akses menuju Krayan belum memadai. Kondisi jalan rusak parah dan minimnya pembangunan jembatan. Infrastruktur telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, air bersih dan listrik juga sangat minim. Kesejahteraan ekonomi masyarakat di perbatasan masih berkiblat kepada Malaysia. Potensi kawasan perbatasan seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata, belum dikelola dengan maksimal. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis strategi pengembangan wilayah perbatasan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Krayan Kabupaten Nunukan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan melakukan wawancara kepada informan dan pengamatan langsung di lapangan. Metode pengumpulan data menggunakan multi sumber bukti (*triangulasi*) dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Teknik analisis data menggunakan model *spradley* dengan melakukan analisis dari perspektif geografis, pemerintahan, penduduk dan ketenagakerjaan, infrastruktur dan transportasi, pertanian, tata ruang, dan fungsi strategis wilayah Krayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wilayah perbatasan di Krayan belum merata. Minimnya ketersediaan dan rendahnya kualitas jalan, jembatan, kesehatan, pendidikan, listrik dan telekomunikasi sehingga masyarakat di perbatasan masih sangat bergantung dengan fasilitas yang ada di negeri tetangga. Belum sinergisnya antara kebijakan dan agenda pembangunan di kawasan perbatasan Krayan baik tingkat daerah maupun pusat sehingga belum maksimalnya pengembangan wilayah perbatasan di Krayan. Mendorong pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Krayan berbasis pertanian melalui pembangunan *technopark* pertanian organik, infrastruktur dasar, Pos Lintas Batas Negara, membentuk DOB Kabupaten Krayan, kebijakan desentralisasi asimetris, Perda dan dokumen *masterplan* pembangunan kawasan perbatasan Krayan.

Kata Kunci : Strategi, pengembangan wilayah, perbatasan, kesejahteraan masyarakat, Krayan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERSETUJUAN

Judul TAPM	: Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
Penyusun TAPM	: Helmi Pudaaslikar, S.IP
NIM	: 500895629
Program Studi	: Magister Administrasi Publik
Hari, Tanggal	: Jumat, 24 Agustus 2018

Menyetujui,

Pembimbing II,

Dr. Meita Istianda, S.IP, M.S
NIP. 196705191987012001

Pembimbing I,

Dr. Sofjan Aripin, M.Si
NIP. 196606191992031002

Penguji Ahli

Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si
NIP. 195812151986011009

Ketua Pascasarjanan Hukum, Sosial, dan Politik

Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 195910271986031003

Dekan FHISIP

Prof. Daryono, SH, MA, Ph.D
NIP. 196407221989031019

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

N a m a	: Helmi Pudaaslikar
NIM	: 500895708
Program Studi	: Magister Adiministrasi Publik
Alamat Rumah	: Jl. Kartini No 91 RT.V, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan
Judul Tesis	: Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Megister (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal	: Jumat, 24 Agustus 2018
Waktu	: 10.30 – 12.00 WITA

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Tandatangan

Ketua Komisi Penguji
Dr. Darmanto, M.Ed .....

Penguji Ahli
Dr. Liestyodono, B. Irianto, M.Si .....

Pembimbing I
Dr. Sofjan Aripin, M.Si .....

Pembimbing II
Dr. Meita Istianda, S.IP, M.S .....

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, karena atas pertolongan-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

Selesainya penyusunan TAPM ini adalah karena bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Sofjan Aripin, M.Si selaku Kepala UPBJJ-UT Tarakan sekaligus Pembimbing I yang banyak memberikan arahan, masukan dan bimbingan dalam penyusunan TAPM ini.
2. Ibu Dr. Meita Istianda, S.IP, M.Si selaku Pembimbing II yang telah bersedia membantu membimbing saya dan mengarahkan perbaikan TAPM.
3. Keluarga tercinta, Istri dan anak-anakku terima kasih atas pengertian dan dukungannya dalam menyelesaikan TAPM ini.
4. Rekan-rekan Mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Samarinda, khususnya Pokjar Nunukan.
5. Pihak-pihak yang telah memberikan pemikiran, masukan kritik dan saran untuk perbaikan TAPM ini, terutama Editor saya yang banyak membantu detail penyempurnaan TAPM ini.

Terima kasih yang tak terhingga Penulis sampaikan kepada semua pihak sebagaimana disebutkan di atas, kiranya Tuhan memberkati dan menolong dalam setiap profesi dan usahanya.

Nunukan, Agustus 2018

Penulis,

Helmi Pudaaslikar, S.IP

43145.pdf

RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Helmi Pudaaslikar	
NIM	:	500895629	
Program Studi	:	Administrasi Publik	
Tempat, Tanggal Lahir	:	Long Bawan, 16 Februari 1982	
Riwayat Pendidikan	:	Lulus SDN di Krayan	tahun 1994
	:	Lulus SMP di Krayan	tahun 1997
	:	Lulus SMA di Krayan	tahun 2000
	:	Lulus S1 Ilmu Pemerintahan di DIY	tahun 2004
Riwayat Pekerjaan	:	Tahun 2005 s/d 2006	CPNS Pemda Nunukan
	:	Tahun 2008 s/d 2009	Plt. Kasi Tapem Krayan Selatan
	:	Tahun 2009 s/d 2010	Kasi Tapem Kec. Krayan Selatan
	:	Tahun 2010	Plt. Sekcam Kec. Krayan Selatan
	:	Tahun 2010 s/d 2011	Kasi Trantib Satpol PP Kab. Nunukan
	:	Tahun 2011 s/d 2013	Kasubbag Persidangan DPRD Nunukan
	:	Tahun 2013 s/d 2017	Kabid Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Nunukan
	:	Tahun 2017 s/d skr	Camat Krayan

Nunukan, Agustus 2018

Helmi Pudaaslikar
NIM. 500895629

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43145.pdf

DAFTAR ISI

		Hal
ABSTRACT		i
ABSTRAK		ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT		iii
LEMBAR PERSETUJUAN		iv
LEMBAR PENGESAHAN		v
RIWAYAT HIDUP		vi
KATA PENGANTAR		vii
DAFTAR ISI		viii
DAFTAR TABEL		xii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Perumusan Masalah	11
	C. Tujuan Penelitian	11
	D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	12
	A. Kajian Teori	12
	1. Strategi	12
	2. Pengembangan Wilayah	14
	a. Konsep Pengembangan Wilayah	14

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43145.pdf

b. Teori Pengembangan Wilayah 17

c. Teori – Teori Pembangunan 19

d. Teori Daerah / Wilayah Inti 21

e. Teori Simpul Jasa Distribusi 23

f. Teori Basis Ekspor 25

g. Teori Pertumbuhan Wilayah 27

3. Wilayah Perbatasan 30

a. Pengertian Wilayah Perbatasan 30

b. Macam-macam Perbatasan 32

c. Fungsi Perbatasan 34

d. Kebijakan di Wilayah Perbatasan 37

4. Otonomi Daerah 39

a. Pengertian Otonomi Daerah 39

b. Pengertian Daerah Otonom 39

c. Otonomi Daerah Menurut para Ahli 41

d. Prinsip Otonomi Daerah 43

e. Tujuan Otonomi Daerah 44

5. Pemekaran Daerah 48

6. Konsep Dasar Desentralisasi 48

7. Pengertian Desentralisasi 49

8. Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 50

9. Hubungan Antara Desentralisasi, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat 51

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43145.pdf

10. Pemerintahan Daerah 53
11. *Good Governance* 55
12. Pemberdayaan Masyarakat 56
B. Penelitian terdahulu 57
C. Kerangka Berpikir..... 60
D. Definisi Operasional 61

BAB III METODE PENELITIAN 62
A. Metode Penelitian 62
B. Sumber Data 62
C. Informan 63
D. Metode Pengumpulan data 64
E. Teknik Analisis Data 67

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 69
A. Deskripsi Objek Penelitian 69
1. Kondisi Geografis 69
2. Kondisi Pemerintahan 69
3. Penduduk dan Tenaga Kerja 71
4. Kondisi Pertanian 74
5. Infrastruktur dan Transportasi 77
6. Tata Ruang 78
7. Kesehatan 85
8. Pendidikan 86

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43145.pdf

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 86

1. Analisis dari Perspektif Geografis 86

2. Analisis dari perspektif Pemerintahan 93

3. Analisis dari perspektif Penduduk dan Ketenagakerjaan 95

4. Analisis dari perspektif Infrastruktur dan Transportasi 97

5. Analisis dari Perspektif Pertanian 101

6. Analisis dari Perspektif Tata Ruang 103

7. Analisis dari perspektif Fungsi Strategis Wilayah Krayan 107

BAB V KESIMPULAN 114

A. Kesimpulan 114

B. Saran 114

1. Teoritis 114

2. Praktis 115

DAFTAR PUSTAKA 116

Lampiran Tabel 4.1. Daftar Desa se- Krayan 120

Lampiran Tabel 4.2. Jumlah Organisasi dan Anggotanya di Krayan 122

Lampiran Tabel 4.7. Daftar ruas dan panjang jalan Kabupaten di Krayan ... 123

Kuesioner 124

Matrik Hasil Penelitian 127

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43145.pdf

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Fungsi Kawasan Perbatasan 26

Tabel 4.1. Daftar Desa se- Krayan 65

Tabel 4.2. Data kependudukan dan luas wilayah 65

Tabel 4.3. Persentase Akseptor Keluarga Berencana (KB) aktif terhadap Pasangan Usia Subur di Kecamatan Krayan Tahun 2012 – 2016 67

Tabel 4.4. Jumlah Organisasi dan Anggotanya di Krayan 68

Tabel 4.5. Potensi Pertanian Krayan 69

Tabel 4.6. Potensi Tanaman Pangan Krayan selain Padi 70

Tabel 4.7. Nama Bandara, Panjang Landasan dan Kekuatan 71

Tabel 4.8. Daftar ruas dan panjang jalan Kabupaten di Krayan 72

Tabel 4.9. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Medis di Krayan.. 79

Tabel 4.10. Ketersediaan fasilitas pendidikan 79

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43145.pdf

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan wilayah di Indonesia saat ini masih menyoroti tentang masalah kesenjangan antara kemajuan daerah perkotaan dengan keterbelakangan daerah pinggiran terutama daerah perbatasan. Wilayah perbatasan masih dianggap sebagai daerah yang tertinggal karena kondisinya yang terisolir dengan akses transportasi dan ekonomi yang sangat terbatas serta belum terdapat suatu sistem yang mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan seperti industri dan perdagangan.

Wilayah perbatasan mempunyai kompleksitas di berbagai segi, yaitu sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan. Kondisi ini menjadi fenomena dan perhatian pemerintah lintas sektoral untuk mengubah kawasan perbatasan sebagai daerah terpinggir, terisolir, dan menjadi isu politik yang menjadi perhatian khusus pemerintah pusat maupun daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, melalui program lintas sektor dengan pendekatan kewilayahan.

Paradigma penanganan wilayah perbatasan mengalami pergeseran dari konsep perbatasan sebagai wilayah pinggiran negara menjadi halaman depan negara. Dengan menjadikannya sebagai halaman depan negara, muncul sebuah konsekuensi bahwa wilayah perbatasan yang bersih, maju, tertata rapi sehingga dapat menunjukkan kedaulatan negara dan menyatakan daya saing wilayah perbatasan dengan wilayah lain di perkotaan Indonesia bahkan dengan negara tetangga.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Sebagai daerah yang terletak di perbatasan negara, wilayah Krayan merupakan kawasan yang strategis dan vital bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Strategis karena secara geografis kawasan perbatasan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi sumber daya alam dan peluang pasar yang menjanjikan serta jaraknya yang sangat dekat dengan negara tetangga, yaitu 10,8 km dari pusat kota Krayan, yaitu Long Bawan ke wilayah Sabah / Sarawak Malaysia.

Krayan memiliki garis perbatasan dengan Malaysia bagian Sarawak dan Sabah sepanjang lebih kurang 162,51 km, dengan potensi kawasan yang terletak di Taman Nasional Kayan Mentarang *(Kayan Mentarang National Park)* dengan luas keseluruhan 1,36 juta Ha dan seluas 330.895,69 Ha berada di Krayan (Bahan Paparan Balai TNKM, September 2014). Krayan juga termasuk dalam Kawasan Jantung Borneo *(Heart of Borneo)* yang meliputi 3 (tiga) negara yaitu Indonesia seluas 72%, Malaysia seluas 26% dan Brunei Darussalam seluas 2% (Booklet HOB-Indonesia, hal.6). Jantung Borneo berfungsi sebagai tutupan kawasan hutan, sebagai ekosistem keanekaragaman hayati, menara air, kelerengan kawasan, penyimpan karbon, sosial-budaya dan ekowisata.

Selain potensi kawasan, Krayan juga terkenal memiliki komoditas unggulan berupa Beras Adan organik premium yang telah mendunia dan garam gunung dari mata air yang bersumber di pegunungan Krayan. Setidaknya masyarakat Krayan tercatat menghasilkan Beras Adan dari sawah-sawah di dataran tinggi Krayan sebanyak 12.623 ton pada tahun 2016 (BPS, 2016). Diperkirakan sedikitnya 6 ton Garam Gunung dihasilkan oleh masyarakat dari sumur-sumur garam yang tersebar di beberapa wilayah di Krayan seperti Long

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Midang, Long Layu, Pa Kebuan dan Pa Betung. Tidak termasuk di beberapa lokasi sumur garam yang jarang berproduksi seperti di Terang Baru, Berian Baru dan Ba Liku. Hampir seluruh beras adan dan garam gunung yang dihasilkan oleh masyarakat Krayan memiliki pasar di Malaysia dan Brunei Darussalam mengingat akses pasar yang lebih mudah dan murah ke negara tersebut dengan moda transportasi darat dibanding dengan akses pasar ke wilayah Indonesia yang terdekat sekalipun seperti Malinau, Tarakan, Nunukan dan Tanjung Selor karena menggunakan moda transportasi udara yang tentunya sangat mahal.

Akses pasar ke Malaysia dan Brunei Darussalam yang tergolong dekat, mudah dan murah tersebut, serta selalu terserapnya produk-produk tersebut di pasar luar negeri merupakan peluang pasar yang sangat besar bagi masyarakat dan petani Krayan untuk memproduksi dan menjual lebih banyak lagi. Sekalipun akses darat telah terbuka antara Indonesia dan Malaysia, yaitu dari Long Midang (Indonesia) ke kampung Ba' Kelalan (Malaysia) dan kota Lawas (Malaysia), hal tersebut masih menjadi masalah karena penjualan produk-produk tersebut masih ilegal dan dalam bentuk curah sehingga menurunkan posisi tawar petani Krayan dalam perdagangan lintas batas antar negara.

Masalah daerah perbatasan menjadi semakin penting dan perlu mendapat perhatian khusus mengingat kondisi daerah perbatasan yang serba terbatas sehingga tidak kondusif untuk menjadi pagar yang kokoh. Pengembangan wilayah Krayan menjadi suatu keniscayaan, tidak hanya dari sisi politik, tetapi juga dari sisi ekonomi, sosial dan budaya. Krayan berada di sisi ujung dari ibukota Kabupaten saat ini, kota Nunukan, yaitu berjarak ± 220 km. Secara geografis,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Krayan hanya dapat dijangkau melalui udara. Keterasingan Krayan secara geografis merupakan suatu fakta yang membutuhkan penanganan dan percepatan.

Dengan keterbatasan dan keterasingan seperti itu, masyarakat yang tinggal di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, selama ini bisa dikatakan hidup dengan fasilitas sarana prasarana infrastruktur daerah serta layanan administrasi publik yang jauh dari kata layak. Dengan luas 1.837,54 km², Krayan terdiri dari 89 Desa yang tersebar di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Barat dan Kecamatan Krayan Tengah.

Keterbatasan sarana transportasi dan akses jalan membuat perjalanan untuk mencapai Krayan dari Nunukan hanya bisa ditempuh melalui transportasi udara dengan penerbangan dari Bandara Nunukan ke bandara perintis Long Bawan. Jalur udara sebagai sarana transportasi masyarakat Krayan dan masyarakat dari luar Krayan tentunya bukan sarana yang ideal karena mahal dan terbatasnya durasi penerbangan dan kapasitas minimal. Sarana jalan dan jembatan belum tersedia, yang semestinya mengubah keterasingan Krayan secara geografis, politik dan ekonomi menjadi daerah yang lebih maju, memudahkan masyarakat Krayan untuk menjangkau daerah terdekat yaitu Kabupaten Malinau, apalagi dengan ibukota Kabupaten Nunukan.

Infrastruktur sebagai sarana untuk mempermudah jalur perdagangan hasil bumi dan kerajinan khas Krayan ke kota atau wilayah lain, termasuk ke Serawak dan Sabah belum bahkan sangat tidak memadai.

Krayan merupakan penghasil beras terbesar di Kabupaten Nunukan, yaitu beras Adan yang merupakan padi unggul organik, yang banyak dipasarkan ke

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Malaysia dan Brunei Darussalam. Daerah ini juga memiliki komoditi unik yaitu garam gunung hasil dari pengolahan sumur air bergaram.

Selain itu, Krayan memiliki aktivitas Perdagangan Lintas Batas antara RI – Malaysia melalui beberapa pintu, antara lain : pintu Long Midang – Ba Kelalan (Serawak), Lembudud – Bario (Serawak), Long Layu – Pa Dallih (Serawak), serta 2 (dua) pintu yang berpotensi dikembangkan yaitu Tanjung Karya – Pa Lungan (Serawak) dan Pa Pani (Serawak) – Long Pasia (Sabah). Adapun pintu utama yang paling ramai di antara beberapa pintu tersebut adalah pintu Long Midang – Ba Kelalan di Kecamatan Krayan. Perdagangan Lintas Batas tersebut belum didukung oleh Kantor Pelayanan Imigrasi, Karantina, Bea Cukai dan Keamanan (IQCS).

Provinsi Kalimatan Utara tengah mengusulkan konsep pengembangan wilayah dalam rangka memudahkan akses pelayanan masyarakat sebagai bentuk aspirasi masyarakat dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru, antara lain usulan Kabupaten Krayan, Kabupaten Apau Kayan, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan, Kota Sebatik dan Kota Tanjung Selor (Radar Kaltara, Minggu, 08 Oktober 2017). Upaya ini sebagai salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan, terutama di Krayan mengingat keterisolasian wilayah Krayan yang sangat tinggi.

Ada 7 (tujuh) hal yang menjadi pertimbangan diusulkannya Krayan menjadi Daerah Otonomi Baru (Bahan Paparan Presidium DOB Krayan, 2017), yaitu :

1. Kesenjangan pembangunan di perbatasan Krayan (Indonesia) dengan di Lawas (Malaysia).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Hal yang kontras dalam pengamatan yang dilaporkan oleh Lidya Sitohang (2016), seorang kandidat Doktor pada *New Indonesia Frontier Project, Institute for Management Research Radboud University Netherlands* misalnya dalam hal :

a. Konstruksi jalan, dalam hal Malaysia membangun jalan dengan struktur fondasi perkerasan dan aspal tapi di perbatasan Indonesia hanya dengan konstruksi jalan tanah;
b. Kondisi sekitar bangunan *immigration check* (Pos Imigrasi) antara Ba Kelalan (Malaysia) dengan Long Midang (Indonesia) yang kontras walaupun kondisinya sama-sama bangunan non permanen.
c. Jenis alat transportasi *(the border transporter)* yang digunakan masyarakat Indonesia adalah motor roda dua dan Malaysia menggunakan kendaraan roda empat.
d. Fasilitas pasar di dua kawasan. Di Lawas berupa bangunan ruko yang tertata rapi dan bersih sedangkan di Krayan masih berupa bangunan kayu dan terkesan kumuh tidak dirawat.

Gambaran tersebut ditangkap melalui kamera seperti di bawah ini :

Gambar 1.1

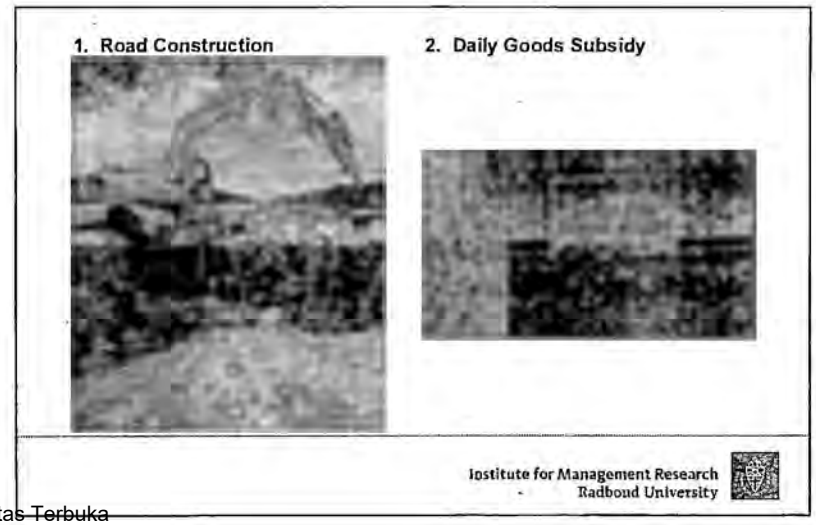

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Gambar 1.2

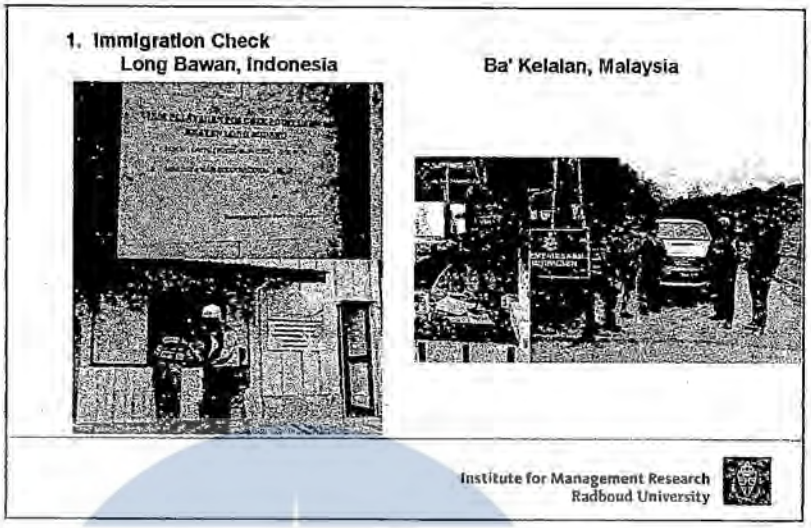

Sumber : Bahan paparan Lidya Sitohang, 2016.

2. Krayan merupakan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

Konsepnya tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan, menetapkan Long Midang sebagai PKSN dengan fungsi sebagai :

a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pelayanan pemerintahan;
d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
e. pusat perdagangan dan kesehatan;
f. pusat perdagangan dan jasa;
g. pusat industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dan karet;
h. pusat pengembangan ekowisata;
i. pusat pelayanan transportasi udara;
j. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Namun pada kenyataannya aktualisasi sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional belum dirasakan di Krayan.

3. Krayan merupakan Lokasi Prioritas 1 dan Lokasi Prioritas 2 dalam penanganan pembangunan perbatasan.

   Hal ini dinyatakan dalam Peraturan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025, bahwa Krayan menjadi sasaran lokasi penanganan 2011-2025 sebagai Lokasi Prioritas (Lokpri) I dan Krayan Selatan sebagai Lokpri II.

4. Kontribusi dalam pertahanan dan menjaga kedaulatan NKRI.

   Secara faktual peran serta masyarakat adat Dayak Lundayeh di perbatasan Krayan dalam menjaga kedaulatan NKRI sudah terjadi sejak turun temurun di mana batas-batas wilayah negara dipelihara dan dilindungi oleh masyarakat adat. Dalam beberapa kesempatan mereka menjalin hubungan kerjasama sosial, ekonomi dan budaya untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan silahturahmi yang akhirnya berdampak pada penguatan pertahanan dan keamanan wilayah di perbatasan.

5. Potensi Kawasan.

   Krayan memiliki segudang potensi yang belum berkembang oleh karena adanya hambatan infrastruktur. Misalnya dalam sektor pertanian dan perkebunan, masyarakat sejak dahulu telah memiliki komoditas Beras

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Adan, Vanili, Nenas, Jeruk, Kopi, Cengkeh, Gula Tebu, dan buah-buahan musiman hutan tropis seperti durian, rambutan *(beritem)*, langsat, lengkeng (mata kucing), sawo hutan *(pugi'/puak)*, dan masih banyak lagi yang dapat dikembangkan, namun sebagian besar dari itu tidak dilanjutkan pengembangannya oleh masyarakat oleh karena tidak tersedianya akses pasar untuk memperdagangkan komoditi-komoditi tersebut. Kalaupun ada dengan cara tradisional ke Malaysia, umumnya dengan harga yang sangat murah dan tidak menjamin menguntungkan bagi para petani.

6. Rentang kendali pemerintahan yang sangat jauh.

   Untuk melayani masyarakat yang ada di wilayah perbatasan Krayan, Pemerintah Kabupaten Nunukan harus menjangkau wilayah ini hanya dengan menggunakan pesawat udara. Setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Nunukan harus menganggarkan melalui APBD sejumlah dana untuk Subsidi Ongkos Angkut Penumpang Perintis, mengingat belum ada maskapai udara komersial yang berminat melayani ke wilayah Krayan.

   Kondisi tersebut tentu sangat menyulitkan bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan, pengawasan dan pembinaan teritorial dan sebaliknya bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Hal ini berdampak pada lambatnya kemajuan pembangunan di wilayah perbatasan. Atas pertimbangan rentang kendali yang sulit inilah kemudian masyarakat meminta kepada Pemerintah Pusat agar memberikan Otonomi Khusus di Perbatasan. Ane Parmatasari dalam Humphrey Wangke (2018:79) mengatakan bahwa Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

untuk melakukan pemekaran daerah dengan memberikan otonomi khusus perbatasan karena minimnya aksesibilitas sosial dan ekonomi mereka.

7. Percepatan pembangunan perbatasan.

   Lambatnya kemajuan pembangunan di wilayah perbatasan Krayan disebabkan terbatasnya kemampuan daerah dalam mengalokasikan anggaran ke seluruh wilayah Kabupaten Nunukan termasuk Krayan. Hal ini disebabkan oleh banyak dan luasnya wilayah yang harus dibangun dengan dana yang terbatas. Belum lagi jika dikaitkan dengan mahalnya harga material bangunan di wilayah perbatasan Krayan menyebabkan dana yang dikucurkan untuk pembangunan di wilayah tersebut tidak berdampak besar dan signifikan karena jangkauannya yang terbatas.

   Dengan diberikannya otonomi khusus perbatasan diharapkan akan terjadi konsentrasi anggaran dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah sehingga mempercepat terwujudnya pembangunan wilayah perbatasan yang maju dan sejahtera.

Berdasarkan masalah dan pokok masalah pada latar belakang di atas, dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Krayan, memerlukan penanganan khusus, konsisten, dan integratif (holistik) yang memerlukan kajian lanjut dalam bentuk " Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan dalam Peningkata Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara."

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah : **"Bagaimanakah strategi pengembangan wilayah perbatasan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Krayan Kabupaten Nunukan?"**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pengembangan wilayah perbatasan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Krayan Kabupaten Nunukan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Akademis (Teoritis)

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah perbatasan di Indonesia dan memberikan kontribusi bagi studi administrasi publik pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

   Memberikan masukan kepada pengambil keputusan yang berkaitan dengan pengembangan wilayah di Indonesia.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Strategi

a. Definisi Strategi

Dalam J. Salusu (1996) terdapat beberapa definisi tentang strategi menurut beberapa ahli, di antaranya yaitu :

1) Hax dan Majluf berpendapat bahwa strategi adalah :
   a) suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu dan integral;
   b) menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya;
   c) menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti organisasi;
   d) mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi, dan kekuatan serta kelemahannya;
   e) melibatkan semua tingkat hierarki dari organisasi.

2) J. Salusu dengan bertolak dari pemahaman McNichols berpendapat bahwa strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan definisi strategi yang dikemukakan oleh Prof. J. Salusu di atas dimana strategi dilihat sebagai suatu upaya menggunakan sumber daya wilayah perbatasan di Krayan untuk pengembangan wilayah perbatasan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

b. Konsep-Konsep Stratejik

Salusu (1996:6) dalam buku Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprovit mengatakan bahwa konsep-konsep stratejik memberi perhatian pada perumusan tujuan dan sasaran organisasi, faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan, serta peluang-peluang dan tantangan.

Selanjutnya Hatten dan Hatten (1988) dalam buku yang sama menegaskan bahwa intisari dari konsep stratejik ada dua, yaitu kompetensi distinktif *(distinctive competence)* dan keunggulan kompetitif *(compatitive advantage)*, atau diistilahkan juga dengan keunggulan daya saing yang berarti "garaplah apa yang paling baik Anda lakukan sesuai kemampuan Anda dan laksanakan!" Sementara itu, "pilihlah pasar di mana Anda bisa mengalahkan kompetitor

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Anda, dan hindari mereka." Tanpa keunggulan kompetitif, tidak ada kemampuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis yang sungguh-sungguh.

2. Pengembangan Wilayah

a. Konsep Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah merupakan upaya membangun dan mengembangkan suatu wilayah berdasarkan pendekatan spasial dengan mempertimbangkan aspek sosial-budaya, ekonomi, lingkungan fisik dan kelembagaan dalam suatu kerangka perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang terpadu. Alkadri, (1999:21). Pendapat tersebut lebih lanjut dipertegas oleh Nugroho dan Dahuri (2002:20) bahwa perumusan suatu kebijakan ekonomi dan program pembangunan harus mempertimbangkan aspek wilayah, lingkungan dan sosial sebagai satu kesatuan sehingga tercapai kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan wilayah tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hukum, politik, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat yang langgeng (*sustainable welfare*). Tujuan tersebut dapat dicapai apabila wilayah yang bersangkutan mempunyai kondisi yang dinamis untuk menghadapi persaingan. Untuk itu konsep pembangunan suatu wilayah harus tetap mengacu pada kondisi wilayah itu sendiri Alkadri, (1999:24).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Konsep pengembangan wilayah perbatasan memuat langkah-langkah strategis, terpadu, prioritas, dengan tahapan pengembangan yang jelas dan konsisten. Konsep ini perlu dijadikan pegangan yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Swasta dan Lembaga Masyarakat Adat. Harry,S dan Harmadi.B (2011).

Salah satu konsep pengembangan wilayah yang dikemukakan oleh Mangiri dan Widiati dalam Alkadri, dkk, (1999:29) adalah pengembangan wilayah berbasis sumber daya. Konsep tersebut digunakan karena kuantitas dan kualitas sumber daya yang dimiliki satu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Konsep ini dapat dilaksanakan dengan beberapa pilihan strategi berikut ini:

a. Pengembangan wilayah berbasis input, tetapi surplus sumber daya manusia.
b. Pengembangan wilayah berbasis input, tetapi surplus sumber daya alam.
c. Pengembangan wilayah berbasis sumber daya modal dan manajemen.
d. Pengembangan wilayah berbasis seni, budaya dan keindahan alam.
e. Pengembangan wilayah berbasis penataan ruang (lokasi strategis).

Konsep pengembangan wilayah berbasis sumber daya dapat dikembangkan menjadi *local economic development* (LED). Blakely dalam Pamungkas, (2004:37) menyatakan bahwa LED memiliki ciri yang utamanya adalah adanya kebijakan-kebijakan *endogenous development* yang menggunakan potensi lokal sumberdaya manusia, institusi dan sumberdaya alam (fisik). Berkaitan dengan pengembangan ekonomi lokal, Coffey dan Polese dalam Pamungkas, (2004:45) memberikan gambaran bahwa pengembangan lokal dapat diartikan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sebagai peningkatan peran elemen-elemen *endogenous* dalam kehidupan sosial-ekonomi suatu lokalitas, dengan tetap melihat keterikatan serta integrasinya secara fungsional dan spasial dengan wilayah (*region*) yang lebih luas. Inti dari LED adalah mendorong munculnya semangat kewirausahaan lokal serta bertumbuh kembangnya perusahaan-perusahaan lokal.

Konsep pengembangan wilayah yang lainnya adalah pengembangan wilayah berbasis ekologi. Konsep ini mulai berkembang sejak adanya kesadaran bahwa pembangunan wilayah yang hanya dinilai dari segi ekonominya saja telah mengakibatkan kerusakan pada sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Eksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sementara menurut Rees dalam Kuncoro, (2004:54), " masyarakat bergantung pada bermacam-macam sumber daya ekologi dan fungsinya untuk memenuhi kebutuhannya".

Konsep pengembangan wilayah berbasis ekologi merupakan suatu konsep yang memperhatikan aspek ekologis dalam perencanaan wilayah. Seberapa besar wilayah yang harus "dimanfaatkan" atau "disisakan" untuk kepentingan ekologis, mana saja fungsi ekologis yang tetap harus dipertahankan serta bagaimana peran dan fungsi masing-masing ruang ditinjau dari aspek ekologis. Menurut Kuncoro dalam Zamzami (2016:16), konsep pembangunan berbasis ekologis dapat dilakukan melalui :

a. Preservasi lingkungan alam, memanfaatkan kembali material, energi, air, seefisien mungkin dan meminimalkan limbah.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui dan bersih melalui ekstraksi dan pengolahan.
c. Preservasi dan memperluas pilihan untuk masa kini dan mendatang melalui penyediaan informasi dan alternatif disain yang mendorong penggunaan sumber daya, teknologi dan metode yang berkelanjutan dan sesuai dengan lingkungan dan budaya setempat yang ada di wilayah tersebut, seperti sumber daya alam yang dimiliki wilayah itu sendiri.

b. Teori Pengembangan Wilayah

Dalam banyak kepustakaan tentang pembangunan, terdapat beberapa pendekatan dan teori, diantaranya adalah *growth theory, rural development theory, agro first theory, basic needs theory*, dan lain sebagainya. Teori-teori pembangunan itu memuat berbagai pendekatan ilmu sosial yang berusaha menangani masalah keterbelakangan. Teori pembangunan benar-benar lepas landas hanya setelah diketahui bahwa persoalan pembangunan di Dunia Ketiga bersifat khusus dan secara kualitatif berbeda dari "*transisi orisinil*". Sepanjang evolusinya, teori pembangunan menjadi semakin kompleks dan nondisipliner. Dengan demikian, tidak akan ada definisi baku dan final mengenai pembangunan, yang ada hanyalah usulan mengenai apa yang seharusnya diimplikasikan oleh pembangunan dalam konteks tertentu Ma'arif, (2000:72).

Salah satu teori pembangunan wilayah adalah pertumbuhan tak berimbang (*unbalanced growth*) yang dikembangkan oleh Hirscham dan Myrdal. Teori pertumbuhan tak berimbang memandang bahwa suatu wilayah tidak dapat berkembang bila ada keseimbangan, sehingga harus terjadi ketidakseimbangan. Penanaman investasi tidak mungkin dilakukan pada

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

setiap sektor di suatu wilayah secara merata, tetapi harus dilakukan pada sektor-sektor unggulan yang diharapkan dapat menarik kemajuan sektor lainnya. Sektor yang diunggulkan tersebut dinamakan sebagai *leading sektor*. Sesungguhnya teori pembangunan terkait erat dengan strategi pembangunan, yakni perubahan struktur ekonomi dan pranata sosial yang diupayakan untuk menemukan solusi yang konsisten bagi persoalan yang dihadapi. Berbagai pendekatan menyangkut tema-tema kajian tentang pembangunan, satu diantaranya adalah mengenai isu pembangunan wilayah. Secara luas, pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan Nugroho dan Dahuri, (2004:61).

Pengembangan wilayah pada hakikatnya adalah pengembangan di daerah yang bersifat menyeluruh, artinya pembangunan tidak hanya menyentuh aspek pengembangan fisik, tetapi yang lebih prinsip adalaha upaya memaksimalkan potensi sumber daya manusia agar dapat pengelola sumber daya absolut yang dimiliki daerahnya secara baik Pheni Chalid, (2007:9.27).

Pengembangan wilayah pada masa desentralisasi cenderung diartikan sebagai pemekaran wilayah yang pada dasarnya memiliki muatan politis yang kental. Pemekaran wilayah lebih pada upaya mengakomodasi elit-elit di daerah agar desentralisasi tidak terjebak pada disintegrasi dan lebih lanjut

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dijelaskan Pheni Chalid, (2007:9.27) bahwa hingga saat ini, asumsi pengembangan wilayah masih berkutat pada paradigma lama yaitu pembangunan fisik sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan, sedangkan pembangunan manusia hingga saat ini belum menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan.

Dalam kerangka pengembangan wilayah, perlu dibatasi pengertian "wilayah" yakni ruang permukaan bumi dimana manusia dan makhluk lainnya dapat hidup dan beraktivitas. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, wilayah diartikan sebagai kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Dalam kerangka pembangunan nasional, pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil perbedaan pertumbuhan kemakmuran antar wilayah atau antar daerah dan perbedaan kemakmuran antara perkotaan dan pedesaan Jayadinata, (1999:81).

c. Teori-Teori Pembangunan

1) Teori Evolusi

Teori evolusi mengacu kepada evolusi peradaban yang dikemukakan oleh Charles Darwin (1871) yang menyebutkan bahwa setiap komunitas akan mengalami perubahan dari kehidupan yang sangat sederhana ke arah yang lebih kompleks, sebagai akibat dari perubahan-perubahan sosial, ekonomi, kependudukan, geografi, rasial, teknologi, maupun ideologi. Teori evolusi ini, digunakan dalam ilmu

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

antropologi untuk memahami perkembangan kehidupan masyarakat yang ada di wilayahnya.

2) Teori Perubahan Sosial

Emile Durkheim (1964) yang menyatakan bahwa pembangunan terjadi sebagai akibat adanya perubahan struktur sosial dalam bentuk pembagian kerja. Sedangkan Redfield (1947) menyatakan bahwa pembangunan terjadi karena terjadinya perubahan masyarakat tradisional ke arah masyarakat perkotaan.

3) Teori Konflik

Teori konflik dicetuskan oleh Kalr marx (1919-1883) yang menyatakan bahwa pembangunan terjadi, karena adanya konflik atau pertentangan kepentingan keonomi antar kelas pemodal (yang berkuasa) dan kelas yang tertindas (buruh).

4) **Teori Ekologi**

Teori ekologi dikemukakan oleh Odum (1971) tentang hubungan antar manusia dengan lingkungannya (fisik dan sosial). Menurut teori ini, pembangunan terjadi sebagai akibat pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah, maupun optimasi pemanfaatan sumber daya yang semakin terbatas.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5) **Teori Ketergantungan**

Teori ketergantungan yang di Amerika Latin sebagai mana dilaporkan oleh Frank Wilber, (1979) di mana negara maju mendominasi negara yang belum berkembang, sedemikian rupa sehingga pembangunan di negara yang belum maju sangat tergantung kepada kehendak/kebutuhan negara maju yang menjadi penjajahnya.

d. Teori Daerah / Wilayah Inti

John Friedmann (1964) dalam Adisasmita (2008:117) menganalisis aspek-aspek tata ruang, lokasi serta persoalan-persoalan kebijakan dan perencanaan pengembangan wilayah dalam ruang lingkup yang lebih umum. Friedmann lebih lanjut mengatakan bahwa pusat-pusat besar pada umumnya berbentuk kota-kota besar, metropolis atau megalopolis, dikategorikan sebagai daerah-daerah inti, dan daerah-daerah yang relatif statis sisanya merupakan subsistem-subsistem yang kemajuan pembangunannya ditentukan oleh lembaga-lembaga di daerah inti dalam arti bahwa daerah-daerah pinggiran berada dalam suatu hubungan ketergantungan yang substansial.

Proses daerah-daerah inti mengkonsolidasikan dominasinya terhadap daerah-daerah pinggiran dilaksanakan melalui pengaruh-pengaruh umpan balik pertumbuhan daerah inti, yang terdiri dari pengaruh dominasi (melemahnya perekonomian di daerah-daerah pinggiran sebagai akibat dari mengalirnya sumberdaya-sumberdaya alam, manusia, dan modal ke wilayah inti), pengaruh informasi (peningkatan dalam interaksi potensial untuk menunjang pembangunan inovatif), pengaruh psikologi (penciptaan kondisi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang menggairahkan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan inovatif secara lebih nyata), pengaruh mata rantai (kecenderungan inovasi-inovasi untuk menghasilkan inovasi lainnya), dan pengaruh produksi (penciptaan struktur balas jasa yang menarik untuk kegiatan-kegiatan inovatif). N.M Hasen *(ed)*, 1972:94-95 dalam Adisasmita, R, (2008:118-119).

Friedmann bersama Aloson kemudian mengembangkan klasifikasi daerah inti dan daerah-daerah pinggiran menjadi daerah metropolitan (*metropolitan region*), poros pembangunan (*development axes*), daerah perbatasan (*frontier region*), dan daerah tertekan (*depressed region*). Secara esensial hubungan antara daerah metropolitan dengan daerah-daerah perbatasan tidak berbeda dengan hubungan antara daerah inti dengan daerah-daerah pinggiran. Poros pembangunan merupakan perluasan dari daerah metropolitan dan sebagai bentuk embrio untuk berkembang menjadi megapolis. Wilayah perbatasan termasuk dalam kategori daerah pinggiran, dan di dalamnya terdapat pusat-pusat kecil yang mempunyai potensi berkembang menjadi pusat-pusat yang lebih besar pada masa depan Adisasmita, R, (2008:120).

Dari klasifikasi di atas, dapat diperoleh pelajaran yang bermanfaat, yakni suatu kebijakasanaan nasional pengembangan wilayah harus menyadari bahwa masalah-masalah dan metode pembangunan adalah berbeda-beda untuk setiap wilayah, selain dari pada itu perubahan-perubahan ekonomi dan pembangunan pada umumnya yang terjadi di seluruh jenis wilayah mempunyai ketergantungan satu sama lainnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

e. Teori Simpul Jasa Distribusi

Menurut Poernomosidi Hadjisarosa dalam Adisasmita. R, (2008:123) yang mengembangkan teori simpul distribusi bahwa pengembangan wilayah nasional, mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut :

a. Mewujudkan keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhannya.
b. Memperkokoh kesatuan ekonomi nasional.
c. Memelihara efisiensi pertumbuhan nasional.

Ketiga tujuan tersebut di atas, saling berkaitan dan berkelakuan searah. Salah satu di antara ketiga tujuan tersebut (butir 1) merupakan titik sentral, yakni keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhannya. Keseimbangan antar daerah, selain memenuhi tuntutan keadilan sosial, juga memungkinkan berlangsungnya perdagangan antar daerah yang berimbang. Perdagangan antar daerah yang berimbang adalah perdagangan yang efisien. Perdagangan yang efesien, mendorong semakin intensifnya perdagangan antar daerah. Perdagangan antar daerah yang intensif merangsang timbulnya "spesialisasi daerah" yang berarti pula membuka kesempatan yang lebih besar lagi bagi masing-masing daerah untuk berkembang. Perdagangan antar daerah menimbulkan ketergantungan ekonomis antar daerah. Spesialisasi daerah membuat perdagangan antar daerah semakin intensif, yang berarti semakin tingginya ketergantungan ekonomis antar daerah. Tingkat ketergantungan ekonomi antar daerah merupakan salah satu ukuran yang efektif bagi kesatuan ekonomi nasional.

Teori "simpul jasa distribusi" berpijak pada hasil pengenalan atas faktor penentu lokal "kemudahan". Dalam pengertian ini kemudahan menempati kedudukan yang sentral karena; 1) merupakan sumber dorongan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

bagi pengembangan kegiatan usaha yang bersifat multi sektoral, dan 2) di samping memberikan arti pada pendapatan dianggap pula sebagai sumber rangsangan bagi tumbuhnya dinamika masyarakat yang memungkinkan terwujudnya daya pengembangan wilayah yang universal sifatnya. Adisasmita. R, (2008:124).

Berlangsungnya pengembangan wilayah, maka kemudahan pun meningkat. Dengan tingkat kemudahan yang lebih tinggi, kesempatan untuk tumbuhnya kegiatan usaha lebih tinggi. Daya Tarik untuk berpindahnya penduduk juga lebih tinggi, sehingga pertumbuhan yang benar-benar terjadi pun kemungkinan besar akan lebih tinggi. Tingkat kemudahan yang berlaku tergantung pada tingkat pengembangan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). Penyebaran tingkat kemudahan pada suatu SWP ditentukan oleh struktur pengembangan yang berlaku padanya. Adisasmita, R, (2008:128).

Jasa distribusi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan pembangunan secara fisik, terutama jika ditinjau pengaruhnya dalam penentuan lokasi tempat berkelompoknya berbagai kegiatan usaha dan kemudahan-kemudahan, demikian pula fungsinya dalam proses berkembangnya wilayah. Sebagai pendukung utama mekanisme pengembangan wilayah, jasa distribusi dianggap oleh P. Hadjisarosa, 1980:4-5 dalam Adisasmita, R, (2008: 130) sebagai satu-satunya unsur yang memenuhi kriteria berikut ini : 1) merupakan unsur penyalur kekuatan ekonomi yang utama, 2) orientasi pelayanannya kepada masyarakat tidak hanya ke dalam, melainkan ke luar, dan 3) jangkauan pelayanannya kepada masyarakat tidak hanya bersifat lokal, melainkan juga berjangkauan jauh.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

f. Teori Basis Ekspor

Teori basis ekonomi (*economic base theory*) adalah salah satu teori yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (negara), bersumber pada permintaan dari wilayah (negara) di luar. Teori basis ekspor merupakan bentuk model pendapatan wilayah yang paling sederhana. Pentingnya teori ini terletak pada kenyataan bahwa ia memberikan kerangka teoritik bagi banyak studi multiplier (pengganda) wilayah secara empiris. Asumsi pokok dari teori ini adalah bahwa ekspor merupakan satu-satunya unsur otonom dalam pengeluaran, dan komponen pengeluaran lainnya dianggap sebagai fungsi dari pendapatan. Sirojuzilam dan Mahalli, (2010:43).

Teori basis ekspor membagi wilayah yang melakukan perdagangan menjadi dua, yaitu wilayah yang bersangkutan dan wilayah-wilayah sisanya, demikian pula struktur perekonomian dibedakan menjadi dua yaitu sektor dasar (*basic activities*) dan sector non dasar (*non basic activities*). Kegiatan dasar menghasilkan barang-barang untuk ekspor ke luar wilayah, sedangkan kegiatan non dasar memproduksi barang-barang dan jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Asumsi yang digunakan yakni kegiatan dasar merupakan kunci pertumbuhan wilayah. Adisasmita, R, (2008: 44).

Menurut teori basis ekspor, suatu wilayah bertumbuh atau berkembang sebagai akibat dari spesialisasi dalam kegiatan ekspor, dengan ekspor akan diperoleh pendapatan, hal ini dapat meningkatkan kekayaan dan kemampuan suatu wilayah untuk melaksanakan pembangunan dan membayar harga barang-barang yang diimpornya dari wilayah di luar. Analisis ini pada

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dasarnya menggunakan teori perdagangan internasional yang diterapkan pada batas suatu wilayah.

Kritikan terhadap pendekatan basis ekspor seperti, kesulitan dalam mengukur dan membedakan antara kegiatan-kegiatan dasar dengan kegiatan-kegiatan non dasar, pembagian wilayah-wilayah yang bersangkutan dan wilayah-wilayah sisanya yang tidak realistis, sehingga hasil analisisnya tidak akan sempurna, karena pertumbuhan wilayah terletak pada perubahan yang berasal dari luar yaitu permintaan terhadap ekspornya. Adisasmita, R, (2008:45).

Aktivitas basis memiliki peranan sebagai penggerak utama (*primer mover*) dalam pertumbuhan suatu wilayah, semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain akan semakin maju pertumbuhanan wilayah tersebut, dan demikian sebaliknya. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek ganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian regional Adisasmita, R, (2005:40).

Sektor unggulan adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah dan mempunyai keuntungan kompetitif (*competitive advantage*) yang cukup tinggi, namun kurang memiliki keunggulan komparatif yang memadai, sedangkan sektor terbelakang merupakan sektor yang bukan merupakan tulang punggung perekonomian dan tidak memiliki keunggulan komparatif Tarigan, (2010). Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja Arsyad, (1999:35).

Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor. Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah, salah satu teknik yang lazim digunakan adalah kuosien lokasi (Location Quotient, LQ). *Location Quotient* digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor-sektor basis atau unggulan (*leading sektors*). Dalam teknik LQ berbagai peubah (faktor) dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan wilayah, misalnya kesempatan kerja (tenaga kerja) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah.

g. Teori Pertumbuhan Wilayah

1) **Pertumbuhan Dari Dalam**

Pertumbuhan dari dalam dimaksudkan sebagai telaahan atau wacana yang mengamati proses berlangsungnya pertumbuhan pembangunan dalam suatu wilayah ditinjau dari segi hubungan struktural (keterkaitan antar sektor) maupun dari hubungan fungsional (interaksi antar sub sektor dalam suatu wilayah). Wilayah-wilayah tersebut diartikan sebagai sub system (regional) dari suatu sistem yang lebih besar (nasional), sehingga tugas yang pertama dilakukan adalah melihat proses terjadinya konsentrasi kegiatan-kegiatan utama yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

berkembang dan mendorong munculnya pusat-pusat sub sistem wilayah. Adisasmita, R, (2008:37).

Pada wilayah yang mempunyai tingkat pembangunan yang masih relatif rendah dan kaitan secara langsung dengan ketersediaannya surplus hasil pertanian, terdapat dua spesialisasi fungsional yaitu fungsi transportasi dan fungsi niaga (*transportation and commercial functions*) yang memegang peran utama dalam melayani pemasaran. Tempat-tempat pasar di mana surplus hasil pertanian dipertukarkan pada umumnya terletak pada interaksi (pertemuan) rute transportasi (alamiah) yang juga sebagai tempat pertukaran informasi.

Untuk banyak kota transportasi dan niaga muncul sebagai kecenderungan utama dan senantiasa mewarnai kegiatan kegiatan pelayanan pada kota-kota tersebut. Sebaliknya pada wilayah yang memiliki tingkat pembangunan yang relatif tinggi menunjukkan besaran kota-kotanya relatif besar dan berbeda dibandingkan dengan daerah-daerah pedesaan di sekitarnya. Desa-desa mempunyai homogenitas sosial dan memiliki kepentingan umum pada kegiatan sektor pertanian, sebaliknya kota-kota mempunyai hetrogenitas sosial yang diakibatkan pada satu pihak oleh adanya aneka fungsi pekerjaan para penduduknya dan di lain pihak oleh berbeda-bedanya latar belakang asal mereka Hadjisastro, P dalam Adisasmita, R, (2008: 38).

Hetroginitas sosial akan mendorong *spirit* (semangat) perkembangan kota-kota yang mendasarkan pada ciri-ciri rasionalitas

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dari pada keagamaan yang mencerminkan vitalitas untuk berkembang cepat dan membangun dari pada mempertahankan tradisi yang sifatnya statis. Inovasi merupakan bagian dari perubahan teknologi, yang hanya merupakan salah satu faktor untuk pembangunan ekonomi yang lebih mudah terjadi di kota-kota besar dari pada di daerah-daerah pedesaan. Konsekuensi utama dari inovasi adalah adalah spesialisasi dan inovasi menimbulkan perubahan dalam struktur sosial dan politik. Spesialisasi mengakibatkan perubahan dalam hubungan ketergantungan yang lebih tinggi, terutama antar pusat dan wilayah di sekitarnya. Lampard dan Friedmann dalam Adisasmita, R, (2008:39).

2) **Pertumbuhan dari luar**

Pertumbuhan wilayah dari luar lebih menekankan perhatian pada keterkaitan sesuatu wilayah dengan wilayah lain di luarnya. Faktor utama untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah adalah investasi (akumulasi modal), inovasi (kemajuan teknologi), dan sumber daya alam. Ketiga faktor tersebut bersama membentuk pertumbuhan angkatan kerja. Faktor-faktor pertumbuhan tersebut dapat mempunyai ciri sebagai faktor yang terpengaruh secara parsial dan sebagai faktor bebas atau otonom secara parsial. Faktor yang paling bebas di antara faktor-faktor tersebut adalah sumber daya alam seperti keindahan alam, kandungan bahan tambang, kondisi lingkungan yang *favourable*, lokasi pelabuhan laut yang strategis dan lainnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Eksploitasi atau pengolahan sumber daya alam dapat merupakan basis ekonomi untuk suatu proses pembangunan wilayah. Pengolahan sumber daya alam pada suatu wilayah seringkali disebabkan karena adanya permintaan yang berasal dari wilayah lain atau dapat dikatakan untuk memenuhi permintaan dari wilayah di luar. Peningkatan produksi yang dilakukan pada wilayah pengekspor sebagai akibat terjadinya permintaan dari wilayah di luar, akan mempunyai pengaruh multiplier, misalnya pembangunan industri-industri baru atau bahkan kegiatan-kegiatan ekonomiyang mengirim berbagai macam komoditas ke luar wilayah akan menunjang diversifikasi ekspornya. Kegiatan ekspor dari suatu wilayah akan berkaitan dengan kegiatan impornya yang didatangkan dari wilayah lain, artinya bahwa kegiatan perdagangan antar wilayah mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan pada wilayah-wilayah yang terkait Adisasmita, R, (2008:43).

3. Wilayah Perbatasan

a. Pengertian Wilayah Perbatasan

Konsep yuridis Romawi mengenai wilayah perbatasan, sesuai dengan isu yang berkembang pada saat itu sudah mencirikan adanya penetapan wilayah dan konsep kerjasama sesuai dengan peraturan dan pemerintahan yang berkuasa. Konsep kerjasama dan penetapan batas ditentukan oleh kedua pihak yang bertetangga seperti yang dikatakan oleh Aelenei (2001) dalam Zamzami (2016).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Definisi perbatasan yang dikemukakan Aelenei (2001: 112) :

> *"a definition of the border; a method of setting, delimiting and marking it; the papers drawn up by the neighbouring states stipulating the border line; the manner the state referred to regards the issue of bilateral border regime; the internal legislation regarding the border juridical regime".*

Kata *border* atau perbatasan, menurut Guo (1996) dalam Arifin (2015) mengandung pengertian sebagai pembatasan suatu wilayah politik dan wilayah pergerakan. Sedangkan wilayah perbatasan mengandung pengertian sebagai suatu area yang memegang peranan penting dalam kompetisi politik antardua Negara yang berbeda. Jadi, wilayah perbatasan sebenarnya tidak hanya terbatas pada dua atau lebih Negara yang berbeda, namun dapat pula ditemui dalam suatu Negara, seperti kota atau desa yang berada di bawah yarisdiksi yang berbeda. Intinya, wilayah perbatasan merupakan area (baik kota atau wilayah) yang membatasi antara dua kepentingan yurisdiksi yang berbeda (Starke, 2007).

Border area atau dengan sinonim yang sama yaitu *cross-border area* secara luas berkaitan dengan heterogenitas spasial dalam istilah struktur ekonomi dan politik yang terdiri atas dua atau lebih kekuasaan. Berkaitan dengan perwujudan fisik batas wilayah perbatasan, Guo (2005) berpendapat bahwa batas wilayah dapat dibagi menjadi dua pendekatan :

a. Pendekatan bersifat fisik *(Natural Border)*, yaitu wilayah dibatasi oleh batas alam seperti gunung, sungai, danau, laut, pantai, atau selat, karena urgensinya terhadap kepentingan pertahanan batas tersebut seringkali dianggap sebagai batas politik.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Pendekatan bersifat geometrik *(Artificial Border)*, dimana batas tersebut membagi kawasan perbatasan ke dalam batas-batas liner dan non-linier. Batas wilayah dengan pendekatan ini dapat terdiri dari batas buatan (batu, dinding), batas geometris (menggunakan batas koordinat bumi), dan batas *cultural*/budaya (perbedaan budaya, etnis, ideologi).

Secara spesifik wilayah perbatasan itu menjadi eksis apabila unit politik (pemerintahan antar kedua wilayah) terbentuk, batas tersebut membagi dua sistem otoritas politik, dimana fungsi perbatasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Fungsi Kawasan Perbatasan

Guo (2005)	Van Well (2006)
1. Sebagai fungsi *legal*, dimana garis perbatasan membagi wilayah secara formal dalam kewenangan negara; 2. Sebagai fungsi *kontrol* dimana tercatatnya setiap kegiatan di perbatasan sebagai kontrol pemerintah; 3. Sebagai fungsi *fiscal*, berkaitan dengan fungsi keuangan pada sebuah negara.	1. Sebagai *barrier*/pembatas, yaitu membagi secara jelas mengenai aspek ekonomi, administrasi, hukum, kebudayaan dan psikologi; 2. Sebagai *jembatan*, fungsinya adalah menjembatani sebuah program/jaringan strategis, peningkatan kapasitas; 3. Batas sumber daya (*resources*), yaitu adanya kesempatan ekonomi dan politis dalam pemanfaatan sumber daya di kedua wilayah; 4. Sebagai simbol *identitas*, lambang identitas suatu wilayah/bangsa/negara.

b. Macam-Macam Perbatasan

Berdasarkan definisi dan karakteristik perbatasan, O.J. Martinez dalam Tirtosudarmo (2002) yang dikutip dalam Arifin (2015), mengelompokkan perbatasan dalam empat tipe, yaitu :

1) *Alienated borderland*, yaitu suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktivitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan, serta persaingan etnik.

2) *Coexistent borderland*, yaitu suatu wilayah perbatasan di mana konflik lintas batas bisa ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang penyelesaiannya berkaitan dengan masalah kepemilikan sumber daya yang strategis di perbatasan.

3) *Interdependent borderland*, yaitu suatu wilayah perbatasan yang di kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah.

4) *Integrated borderland*, yaitu suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutan yang erat.

Mengacu pada tipologi Martinez di atas, Tirtosudarmo mengkategorikan wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia termasuk di antara tipe kedua dan ketiga, yaitu *coexistent* dan *interdependent borderland.*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. Fungsi Perbatasan

Berdasarkan pengertian mengenai perbatasan di atas, dapat disimpulkan bahwa wilayah perbatasan mempunya beberapa fungsi, yaitu :

1) Fungsi legal, yaitu adanya garis batas yang berfungsi untuk menegaskan batas suatu wilayah dengan suatu standar yurisdiksi dan peraturan negara yang berlaku.

2) Fungsi kontrol, yaitu setiap pergerakan orang maupun barang yang masuk atau keluar dari suatu wilayah perbatasan diatur dan menjadi kontrol negara tersebut.

3) Fungsi fiskal, merupakan pelengkap dari fungsi kontrol yang memberikan hak pada suatu negara untuk menerapkan harga fiskal negara yang dituju.

Selain ketiga fungsi tersebut, perbatasan negara menurut Blanchard sebagaimana dikutip oleh Wuryandari (2009), memiliki tujuh fungsi lainnya yaitu :

1) Fungsi Militer-Strategis. Dalam konteks ini perbatasan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan militer strategis suatu negara, terutama sistem pertahanan laut, darat, udara untuk menjaga diri dari ancaman eksternal.

2) Fungsi Ekonomis. Perbatasan berfungsi sebagai penetapan wilayah tertentu di mana suatu negara dapat melakukan kontrol terhadap arus modal, perdagangan antar negara, investasi asing, pergerakan barang antarnegara.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3) Fungsi Konstitutif. Berdasarkan konsep hukum internasional modern, suatu negara berdaulat wajib memiliki wilayah perbatasan yang terdefinisikan dengan jelas. Artinya, perbatasan menetapkan posisi konstitutif negara tertentu di dalam komunitas internasional. Suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya yang merupakan teritorinya sebagaimana ditetapkan oleh perbatasan yang ada.

4) Fungsi Identitas Nasional. Sebagai pembawa identitas nasional, perbatasan memiliki fungsi pengikat secara emosional terhadap komunitas yang ada dalam teritori tertentu. Kesamaan pengalaman dan sejarah, secara langsung maupun tidak langsung telah mengikat masyarakat secara emosional untuk mengklaim identitas dan wilayah tertentu.

5) Fungsi Persatuan Nasional. Melalui pembentukan identitas nasional, perbatasan ikut menjaga persatuan nasional. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional, para pemimpin negara biasanya mengkombinasikan simbol dan jargon dengan konsep teritori dan perbatasan. Konsep-konsep geopolitik seperti "kekuatan maritim" dan "kekuatan darat", dan konsep pembangunan "membangun Indonesia dari pinggiran" biasanya dipakai untuk mendorong warga agar menjaga persatuan dan kesatuan nasional.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

6) Fungsi pembangunan Negara Bangsa. Perbatasan sangat membantu dalam pembangunan dan pengembangan negara-bangsa karena memberikan kekuatan bagi negara untuk menentukan bagaimana sejarah bangsa dibentuk, menentukan simbol-simbol apa yang dapat diterima secara luas, dan menentukan identitas bersama secara normatif maupun kultural.

7) Fungsi Pencapaian Kepentingan Domestik. Perbatasan berfungsi untuk memberikan batas geografis bagi upaya negara untuk mencapai kepentingan nasional di bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan, pembangunan infrastruktur, konservasi energi, dan sebagainya. Perbatasan juga menetapkan sampai batas mana negara dapat melakukan segala upayanya untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Arifin (2015) menjelaskan bahwa dalam konsepsi Hukum Internasional, wilayah Indonesia pasca kemerdekaan tahun 1945 adalah mencakup seluruh wilayah bekas jajahan Belanda sebagai negara pertama yang berkuasa di Nusantara. Status Belanda yang digantikan Indonesia tersebut di dalam Konvensi Wina *(Article 2 poin (a)* dan *(b) Vienna Convention on Succession of State in respect of Treaties)* tentang Suksesi Negara terhadap Perjanjian disebut *Predecessor State*. Sementara Indonesia sebagai negara yang menggantikannya disebut *Successor State*. Hal ini didasarkan pada prinsip *Uti Possidetis* dalam hukum internasional.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Prinsip tersebut mengandung arti bahwa wilayah negara baru mengikuti semua wilayah dari negara yang menguasai sebelumnya.

Secara makro konsep ini tidak banyak menimbulkan masalah. Namun ketika persoalan makro itu dibawa ke dalam konteks mikronya, seperti penentuan patok-patok batas negara, terutama di wilayah darat, banyak sekali permasalahannya karena penentuan titik patok perbatasan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh Indonesia, tetapi harus melibatkan negara tetangga yang berbatasan seperti Malaysia di pulau Kalimantan, Timor Leste dengan NTT dan Papua Nugini dengan Papua.

Dalam konteks itu menjadi urgen bagi Indonesia untuk melakukan perundingan perbatasan *(border diplomacy)* dengan negara tetangga. Proses diplomasi perbatasan tersebut menurut Jones (1945) dalam Arifin (2015) dalam teori penentuan perbatasan masuk dalam kategori alokasi, delimitasi dan demarkasi. Delimitasi adalah proses penentuan garis batas negara dari ujung ke ujung, sedangkan demarkasi adalah penentuan titik-titik patok perbatasan.

d. Kebijakan di Wilayah Perbatasan

Konsep kebijakan di wilayah perbatasan pada saat ini merepresentasikan program dan komitmen yang mengarah pada demokrasi global. Komitmen terhadap demokrasi global tersebut pada realitanya menghadapi kondisi yang kompleks, karena unsur ideologi dan kultural yang spesifik di wilayah perbatasan Couldry, (2004) dalam Zamzami (2016). Berkaitan dengan kebijakan di perbatasan, pada dasarnya

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

hubungan yang terbentuk sangat menentukan kebijakan antara kedua wilayah, baik dalam konteks regional maupun internasional. Tanpa hubungan yang dapat diterima, kebijakan yang memuaskan, dan hubungan diplomatik, tidak mungkin hubungan tersebut berjalan dengan baik. Henrikson, (2000).

Ide dan gagasan "*composite policy*" yang tepat dalam strategi pengembangan wilayah perbatasan Uni Eropa, terdiri dari tiga paradigma yang berbeda, yaitu: pendekatan penanganan dengan basis pada security, pendekatan pada sisi kohesi, dan pendekatan dari sisi ekspansi/ perluasan. Paradigma kebijakan tersebut dapat menjadi *spill-over effect* integrasi ekonomi bagi pengembangan Uni Eropa. Berg dan Ehin (2006).

Banyak pendekatan dalam pengembangan wilayah perbatasan, namun terdapat tiga faktor penting dalam kaitannya dengan pengembangan kawasan lebih lanjut, yaitu: pengembangan yang didahului oleh perencanaan dan pengembangan *infrastruktur* (sebelum kegiatan pengembangan ekonomi), pengembangan *investasi* di sektor swasta, dan pengembangan *program kebijakan*. Pengembangan dengan Basis Infrastruktur (*Infrastructure-Led Development*) biasanya melibatkan pemerintah dan agen perencanaan agar pembangunan dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan, pendekatan ini biasa dilakukan dengan alasan lokasi yang terpencil (*remote area*), politik maupun alasan keamanan. Wu (2001).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4. Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Secara prinsipil terdapat dua hal yang tercantum dalam otonomi daerah yaitu hak dan wewenang untuk mengatur dan mengelola pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat serta mengandung tanggung jawab apabila terjadi kegagalan dalam mengelola hak dan wewenang otonomi daerah. Sementara "daerah" dalam arti *local state government* adalah pemerintah di daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Sumodiningrat (1999:255) dalam Monoarfa (2016:2) mengemukakan bahwa hakikat otonomi adalah meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari rakyat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh rakyat. Dewasa ini isu otonomi daerah dan demokratisasi menjadi salah satu agenda reformasi yang utama. Tema sentral kebijaksanaan pembangunan di era reformasi adalah mengedepankan paradigma pembangunan manusia yang menempatkan warga negara atau rakyat sebagai pelaku pembangunan dan yang menempatkan otonomi daerah sebagai wahana mewujudkan kesejahteraan rakyat.

b. Pengertian Daerah Otonom

Beberapa pengertian Daerah Otonom menurut ahli dalam Nawawi, (2012) :

1) Kansil

Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan memiliki hak, wewenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Sunarsip

Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan rumusan di atas terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam daerah otonom, yaitu : (Anonim, 2015).

1) Unsur Batas Wilayah

Artinya adalah bahwa suatu daerah harus mempunyai wilayah dengan batas-batas yang jelas sehingga dapat dibedakan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya.

2) Unsur Pemerintahan

Dalam unsur pemerintahan ini, elemen pemerintah daerah adalah meliputi pemerintahan daerah dan lembaga DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

Eksistensi pemerintahan di daerah, berlandaskan atas "legitimasi" (seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin), Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, untuk menjalankan urusan pemerintahan yang berwenang mengatur berdasarkan kreativitasnya sendiri.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3) Unsur Masyarakat

Dalam unsur masyarakat ini, masyarakat sebagai elemen pemerintahan yang dalam artian merupakan kesatuan masyarakat hukum, baik *"gemeinschaft"* (biasanya terdapat pada masyarakat desa) maupun *"gesselschaft"* (kehidupan masyarakat yang ditandai dengan perhitungan untung rugi/kota), jelas mempunyai tradisi, kebiasaan, dan istiadat yang turut mewarnai sistem pemerintahan daerah, mulai dari bentuk cara berpikir, bertindak, dan kebiasaan tertentu dalam masyarakat.

c. Otonomi Daerah Menurut Para Ahli

Beberapa pengertian Otonomi Daerah menurut para ahli dalam (Anonim, 2010) yaitu :

1) Widjaja

Menurut Widjaja menyatakan bahwa Otonomi daerah ialah salah satu bentuk dari desentralisasi suatu pemerintahan yang dasarnya ditujukan guna untuk memenuhi suatu kepentingan bangsa secara menyeluruh, ialah suatu upaya yang lebih mendekatkan berbagai tujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat mewujudkan suatu cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

2) Mahwood

Menurut Mahwood menyatakan bahwa Otonomi daerah ialah suatu hak dari masyarakat sipil guna untuk mendapatkan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sebuah kesempatan serta perlakuan yang sama, baik dalam hal mengekspresikan serta memperjuangkan suatu kepentingan mereka masing-masing, dan ikut mengontrol sebuah penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah.

3) Benyamin Hoesein

Menurut Benyamin Hoesein menyatakan bahwa otonomi daerah adalah suatu pemerintahan oleh rakyat serta untuk rakyat di suatu bagian wilayah nasional Negara secara informal yang berada diluar pemerintah pusat.

4) Mariun

Menurut Mariun menyatakn bahwa Otonomi daerah ialah suatu kebebasan atau kewenangan yang dipunyai suatu pemerintah daerah sehingga memungkinkan mereka dalam membuat sebuah inisiatif sendiri untuk mengelola serta mengoptimalkan sumber daya yang dipunyai daerahnya. Otonomi daerah ialah suatu kebebasan atau kewenangan untuk dapat bertindak sesuai dengan suatu kebutuhan masyarakat pada daerah setempat.

5) Vincent Lemius

Menurut Vincent Lemius menyatakan bahwa Otonomi daerah ialah suatu kebebasan atau kewenangan dalam membuat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

suatu keputusan politik maupun administasi yang sesuai dengan yang ada didalam peraturan perundang- undangan. Di dalam suatu otonomi daerah terdapat sebuah kewenangan yang dipunyai oleh suatu pemerintah daerah dalam menentukan apa yang menjadi suatu kebutuhan daerahnya namun kebutuhan daerah yang lain masih senantiasa harus disesuaikan dengan suatu kepentingan nasional sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

d. Prinsip Otonomi Daerah

1) Prinsip otonomi seluas-luasnya

Prinsip otonomi seluas-luasnya ialah daerah yang diberikan kebebasan dalam mengurus serta mengatur berbagai suatu urusan pemerintahan yang mencakup suatu kewenangan pada semua bidang pemerintahan, kecuali sebuah kebebasan terhadap bidang politik luar negeri, agama, keamanan, moneter, peradilan, keamanan, serta sebuah fiskal nasional.

2) Prinsip Otonomi Nyata

Prinsip otonomi nyata ialah suatu daerah yang diberikan sebuah kebebasan dalam menangani berbagai urusan pemerintahan dengan berdasarkan tugas, wewenang, serta kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi dapat tumbuh, hidup, berkembang dan sesuai dengan suatu potensi yang ada dan ciri khas daerah.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3) Prinsip Otonomi Yang Bertanggung Jawab

Prinsip otonomi yang bertanggung jawab ialah suatu prinsip otonomi yang dalam suatu sistem penyelenggaraannya harus sejalan dengan tujuan yang ada dan maksud dari suatu pemberian otonomi, yang pada intinya guna untuk memberdayakan daerahnya masing-masing termasuk dalam meningkatkan suatu kesejahteraan rakyat

e. Tujuan Otonomi Daerah

Secara normatif tujuan dari otonomi daerah adalah :

1) Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
2) Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat
3) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
5) Peningkatan daya saing daerah
6) Mewujudkan kehidupan bernegara yang demokratis
7) Mempercepat terwujudnya pemerataan keadilan dan pembangunan
8) Membangun wilayah negara berdasarkan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Smith (1985) dalam Syarif Hidayat (2008) tujuan desentralisasi dapat dilihat dari dua perspektif yaitu perspektif desentarlisasi politik dan perspektif desentralisasi administrasi,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik; mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; serta meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Lebih lanjut menurut Prasojo, dkk (2015) dalam praktiknya pelaksanaan desentralisasi memperoleh kritik dan dipandang memiliki kelemahan karena acapkali menggunakan perspektif *supply side* atau perspektif pihak yang memberikan desentralisasi, dalam hal ini pemerintah pusat. Kelemahan tersebut antara lain :

1) Kesenjangan kapasitas sistem pemerintahan dan masyarakat di tingkat lokal karena yang dimiliki daerah melalui desentralisasi tidak mencerminkan kebutuhan dan kemampuan daerah yang sesungguhnya. Penilaian kapasitas daerah tidak dilakukan secara cermat sehingga terkesan desentralisasi hanya sebagai komoditas politik pusat untuk mendapatkan dukungan politik daerah.
2) Desentralisasi acapkali merupakan hubungan *government* (pusat) *to government* (lokal) sehingga menyebabkan *lack motivation* bagi masyarakat daerah untuk berpartisipasi. Dalam konsep ini desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga otonomi daerah diartikan sebagai otonomi pemerintahan daerah. Tak heran jika otonomi daerah tidak banyak memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat daerah, sebaliknya lebih memakmurkan dan mensejahterakan elit-elit lokal.
3) Desentralisasi dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada masyarakat daerah jika otonomi daerah diberikan sebagai otonomi masyarakat daerah bukan hanya otonomi pemerintahan daerah. Ini berarti masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan tujuan dan arah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pertumbuhan pembangunan, termasuk melakukan perubahan sistem yang mendukung tercapainya tujuan tersebut.

4) Mengurangi tingkat legitimasi dan akseptasi masyarakat terhadap pemerintah daerah. Jika kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah hanya memberikan kemakmuran kepada sekelompok elit di daerah, bukan kepada masyarakat daerah secara keseluruhan maka akan terjadi defisit kepercayaan masyarakat terhadap program desentralisasi.
5) Pemerintah Pusat mempunyai justifikasi untuk meresentralisasi kewenangan urusan pemerintahan sebagai akibat terjadinya hal-hal tersebut di atas yaitu ketidakmampuan pemerintahan daerah melaksanakan kewenangan, rendahnya motivasi dan dukungan masyarakat dan terjadinya defisit kepercayaan masyarakat terhadap desentralisasi.

10. Pemerintahan Daerah

Menurut Norton (1994) dalam Sarundajang (2001) secara historis asal usul struktur pemerintahan daerah yang kita kenal saat ini berakar dari Eropa di abad ke-11 dan ke-12. Beberapa isitilah lama yang digunakan untuk pemerintahan daerah berasal dari bahasa Yunani dan Latin kuno, yaitu *koinotes* (komunitas) dan *demos* (rakyat atau distrik). *Municipality* (kota atau kotamadya) dan varian-variannya berasal dari istilah hukum Romawi *municipium. City* (kota besar) berasal dari istilah Romawi *civitas,* yang juga berasal dari kata *civis* (penduduk). *County* (kabupaten) berasal dari *comitates,* yang berasal dari *comes,* kantor dari seorang pejabat kerajaan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam perkembangannya pemerintah daerah kemudian dipandang sebagai unit organisasi pemerintahan berbasis geografis tertentu yang ada dalam suatu negara berdaulat. Jenis pemerintahan ini termasuk unit perantara seperti provinsi, unit dasar seperti kota besar (*city*), kotamadya (*municipality*), atau kabupaten (*county* atau *regency*) dan di beberapa negara berupa sub kota *(submunicipal).*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut pada ketentuan umum dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah dengan berpedoman pada asas kepastian hukum; tertib penyelenggara negara; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; efektivitas; dan keadilan.

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di tingkat Kabupaten/Kota Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas, wewenang, kewajiban dan hak serta larangan yang harus dipedomani sebagaimana diatur pada pasal 65 sampai dengan pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sedangkan mengenai DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam undang-undang yang sama pada pasal 147 sampai dengan pasal 207.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

11. *Good Governance*

Jika mengacu pada program *World Bank* dan *United Nation Development Program* (UNDP), orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. Gunawan Sumodiningrat (1999) dalam Monoarfa, A. (2016) menyatakan *good governance* adalah upaya pemerintahan yang amanah dan untuk menciptkan *good governance* pemerintahan perlu didesentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Sementara itu, *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disipin angaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002) dalam Monoarfa, A. (2016).

Selanjutnya, UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi :

1) *Participation.* Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2) *Rule of Law.* Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3) *Transparancy.* Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4) *Responsiveness.* Lembaga-lembaga publik harus cepat tanggap dalam melayani *stakeholder.*
5) *Consensus Orientation.* Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6) *Equity.* Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7) *Efficiency and Effectiviness.* Pengelolaan sumber daya publik di lakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8) *Accountability.* Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9) *Strategic Vision.* Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, konsepsi *Good Governance* merupakan tujuan yang harus dicapai, sehingga dalam mewujudkannya diperlukan komitmen dan upaya serius untuk mereformasi pelayanan publik, tranparansi, akuntabilitas publik yang akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

12. Pemberdayaan Masyarakat

Di Indonesia ada pergeseran yang menarik dalam hal wacana, paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan (Sutoro Eko, 2004). Dikatakannya bahwa konsep pembangunan desa terpadu pada tahun 1970-an bergeser menjadi pembangunan masyarakat desa pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat mulai akhir 1990-an hingga sekarang. Kini dalam konteks reformasi, demokratisasi dan desentralisasi, wacana pemberdayaan masyarakat mempunyai gaung yang luas dan populer.

Menurut Sutoro Eko paradigma lama (pembangunan) lebih berorientasi pada negara dan modal sementara paradigma baru (pemberdayaan) lebih

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

terfokus pada masyarakat dan institusi lokal yang dibangun secara partisipatif dimana masyarakat menempati posisi utama yang memulai, mengelola dan menikmati pembangunan.

Selanjutnya menurut Krishna (2003) dalam Prasojo, dkk (2015) pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai "peningkatan kapasitas perseorangan atau kelompok untuk mempengaruhi pembangunan *(development)* dan pilihan hidup dan mentransformasikan pilihan tersebut ke dalam tindakan yang diinginkan dan ke dalam hasil bagi pengembangan dari komunitas mereka.

Berdasarkan pemahaman tersebut dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara efektif apabila ditopang oleh sistem pemerintahan yang demoratik dan desentralistik dan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan perikehidupan mereka.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian dalam bidang kebijakan publik yang mengkaji tentang kebijakan pembangunan daerah perbatasan, yaitu :

1. Rifdan (2010)

   Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan pemekaran daerah adalah : sumber daya alam, investasi, infrastuktur transportasi dan komunikasi, keterbukaan terhadap pihak luar, dan adanya dukungan publik (masyarakat).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Aziz Budianta (2010)

Hasil penelitian tersebut dimuat dalam jurnal yang berjudul "Pengembangan Wilayah Perbatasan sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah di Indonesia" menyimpulkan bahwa pengembangan dan pembangunan daerah perbatasan identik dengan pengembangan perdesaan yang berbasis pada sektor usaha pertanian namun dalam iinplementasinya masih banyak terdapat kesulitan untuk memadukan berbagai macam program dan proyek pemerintah daerah yang dikelola oleh berbagai macam instansi terkait, sehingga masih terkesan tumpang tindih. Padahal untuk menghasilkan kemajuan yang cukup signifikan di daerah perbatasan perlu sinergi keterpaduan program dan proyek instansional.

3. Susanti (2014)

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak paling utama dari pemekaran adalah kesejahteraan ekonomi. Hal ini dikarenakan luas daerah yang semakin sempit, rentang kendali yang semakin pendek membuat daerah itu semakin mudah mengelola anggaran dengan maksimal, terjadinya peningkatan kualitas aparatur dan peningkatan kualitas infrastruktur.

4. Zamzami (2016)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Zamzami (2016) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengembangan Wilayah Perbatasan RI-Malaysia di Kabupaten Nunukan, menyimpulkan pengembangan dan pembangunan di wilayah perbatasan antara Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan, dalam rangka meningkatkan perekonomian, dan mensejahterakan masyarakat, belum berjalan optimal. Masih ditemukan kompleksitas permasalahan seperti infrastruktur transportasi yang belum memadai, fasilitas pendidikan, kesehatan, sarana telekomunikasi dan air bersih terbatas serta perekonomian terutama kebutuhan bahan pokok, sebagian kecamatan di wilayah perbatasan masih bergantung dengan Malaysia.

Kondisi geografi wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan yang strategis, dengan tipologi berbukit-bukit dan sungai terjal. Belum sinkron dan sinergisnya kebijakan antar kementerian, BNPP, pemerintah daerah dan BPPD menghambat proses perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRK) Perbatasan Negara, yang telah memasukan sebagian kecamatan wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan sudah masuk Lokasi Prioritas (Lokpri), potensi sumber daya alam dan pertumbuhan penduduk yang signifikan, merupakan faktor pendukung dalam pengembangan dan percepatan pembangunan wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

C. Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir Penelitian

(Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara)

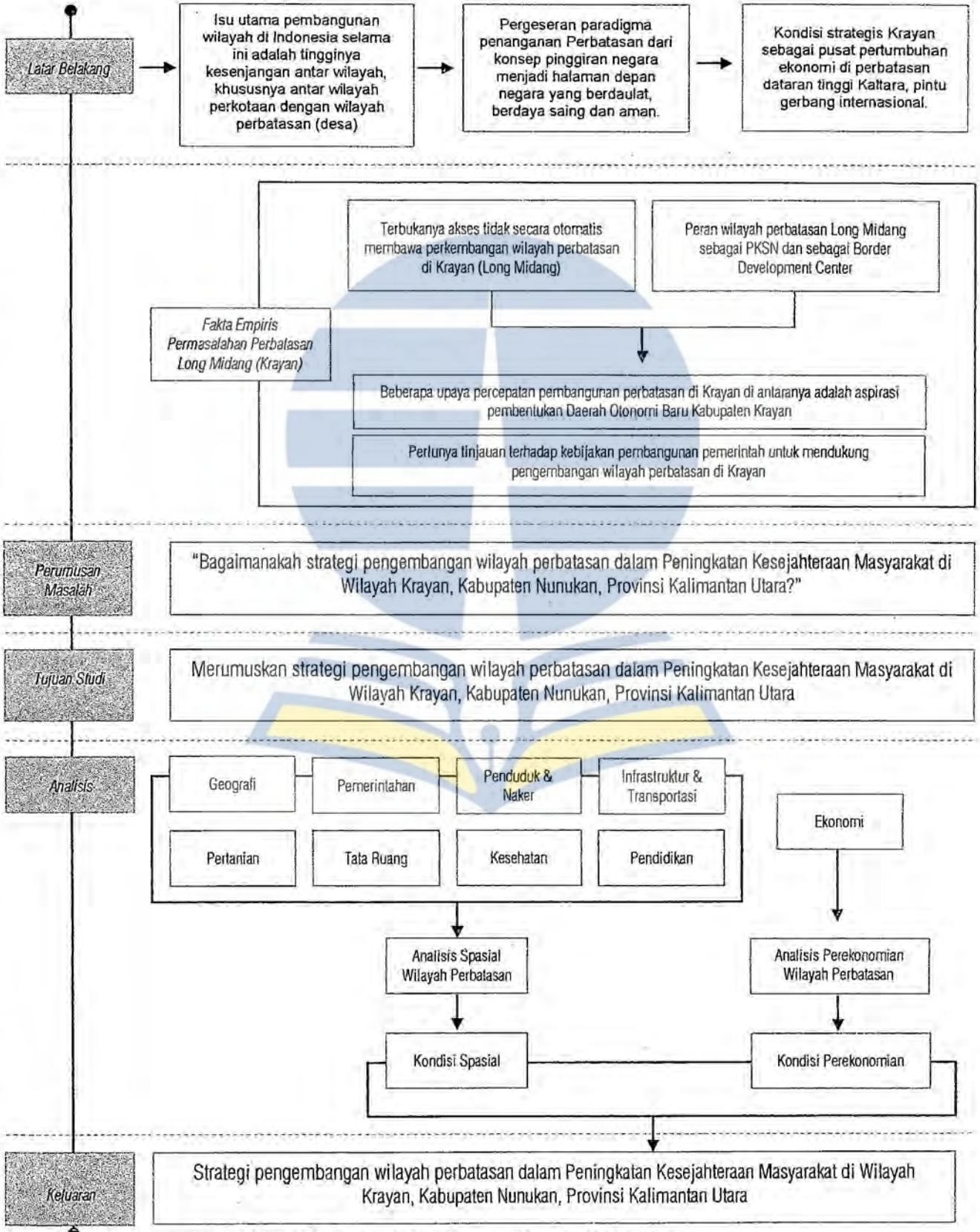

Sumber : Hasil analisis 2017. Diadaptasi dari Dendy Kurniadi, 2009:22

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

D. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini Definisi Operasional diperlukan sebagai sebuah informasi ilmiah yang akan membantu peneliti lain yang kelak ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Selain itu juga diperlukan sebagai informasi bagaimana mengukur variabel penelitian ini.

1. Strategi

   Dalam penelitian ini variabel strategi terkait dengan pendekatan pembangunan manusia *(human development)* yang meliputi pendidikan, kesehatan, pemerintahan, kependudukan dan tenaga kerja, pertanian, tata ruang dan akses terhadap infrastruktur dan transportasi.

2. Wilayah Perbatasan Krayan

   Yang dimaksud dengan wilayah perbatasan dalam penelitian ini adalah wilayah Krayan yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Krayan, Krayan Selatan, Krayan Tengah, Krayan Timur dan Krayan Barat.

3. Kesejahteraan

   Aspek atau dimensi kesejahteraan yang dimaksud dalam penelitian ini diukur dari indikator perekonomian di perbatasan, ketersediaan infrastruktur dan transportasi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, kependudukan dan tenaga kerja, pertanian dan tata ruang.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang memiliki karakteristik alamiah (*natural setting*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, dimana proses lebih dipentingkan dari pada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna merupakan hal yang esensial.

Metode penelitian deskriptif kualititatif dilakukan untuk pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, dengan menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa-peristiwa dan pengetahuan atau obyek studi, mengenai bagaimana strategi pengembangan wilayah perbatasan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Krayan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara?

B. Sumber Data

1. Data primer

Data-data atau fakta-fakta yang diperoleh secara langsung dari Informan Utama melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan dengan mendatangi desa dan kecamatan di wilayah perbatasan yang menjadi obyek dan daerah penelitian. Informan (*key-informan*) yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dijadikan sumber keterangan adalah informan yang benar-benar dapat mengungkapkan dan memberikan penjelasan tentang masalah yang berkaitan dengan strategi pengembangan wilayah perbatasan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Krayan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh atau diambil secara tidak langsung dari sumber yang digunakan untuk mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah teks-teks berita tentang pembentukan DOB Krayan, dokumen dan teks tentang informasi potensi daerah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, buku-buku, dan dokumentasi lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

C. Informan

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan
2. Bappeda Kabupaten Nunukan
3. Biro Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
4. Dinas Pendidikan Nunukan
5. Pemerintah Kecamatan Krayan
6. Puskesmas Long Bawan
7. Tokoh Masyarakat :
   a. Tokoh Adat
   b. Tokoh Gereja

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. Tokoh Pendidikan

8. Presidium DOB Krayan

9. LSM Lembaga Percepatan, Perluasan, dan Pengembangan Pembangunan Krayan (LP4K).

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan multi sumber bukti *(triangulasi)* artinya teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak Sugiyono, (2006).

1. Observasi partisipatif

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Susan Stainback (1988) menyatakan bahwa dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang-orang yang ada di daerah yang menjadi obyek penelitian, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpatisipasi aktif dalam aktivitas mereka. Penelitian dengan observasi partisipatif ini kemudian dikhususkan lagi menjadi partisipasi pasif *(passive participation)* artinya peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai partisipan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Alasan penggunaan pengamatan langsung, karena lebih menjadikan kualitas dan validitas data atau obyek yang diteliti. Dengan pengamatan langsung peneliti sangat memungkinkan untuk dapat melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku, kejadian atau peristiwa yang terjadi pada saat penelitian. Hal ini tentu akan dapat mencegah bias yang biasanya terjadi pada proses wawancara dan observasi.

2. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam ini diartikan bahwa pada saat penelitian, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan secara mendalam kepada informan, terkait hal-hal yang berhubungan dengan fokus permasalahan yang diteliti, sehingga data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat maksimal. Wawancara mendalam ini digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur *(semistructure interview)*, pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur, karena wawancara terstruktur peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Karenanya peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan.

Wawancara semi terstruktur tidak memakai alternatif jawaban, namun informan yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Wawancara mendalam *(in–depth interview)* ini adalah proses untuk memperoleh keterangan dalam rangka penelitian dengan cara melakukan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman *(guide)* wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Menurut Lincoln dan Guba dalam Sanapiah Faisal" langkah-langkah dalam wawancara ini terdiri dari 7 tahap, yaitu:

a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilaksanakan.

b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.

c. Mengawali atau membuka alur wawancara.

d. Melangsungkan alur wawancara.

e. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.

f. Menuliskan hasil wawancara ke dalam cacatan lapangan.

g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh".

Alat-alat yang digunakan dalam wawancara ini adalah buku catatan, laptop, *tape recorder* dan kamera, hal ini bermanfaat untuk mencatat dan mendokumentasikan semua percakapan dengan sumber data, di mana kesemuanya telah digunakan setelah mendapat izin dari sumber data.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Dokumentasi

Tehnik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, seperti tulisan, gambar, surat-surat, buku harian, catatan khusus, foto-foto dan atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan foto dan beberapa dokumen yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan atau orang lain. Karena itu, teknik analisis data yang digunakan peneliti selama di lapangan adalah analisis data kualitatif, menggunakan model spradley dengan tahapan penelitian, yaitu:

1. Tahap penjelajahan dengan tehnik pengumpulan *data grand tour question*, dengan memilih situasi sosial (*place, actor, activity).*

2. Selanjutnya di lapangan, peneliti menetapkan seseorang informan (*key informant)* yang berwibawa dan dipercaya mampu membukakan pintu kepada peneliti untuk memasuki obyek penelitian. Setelah mendapatkan akses, selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut, dan mencatat hasil wawancara. Dalam wawancara peneliti fokus

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

perhatian pada obyek penelitian dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat deskriptif, dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara.

3. Pada tahap menentukan fokus penelitian, peneliti melakukan observasi terfokus pada bidang pengembangan wilayah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan wilayah baik terhadap informan maupun obyek menjadi penelitian.

4. Pada tahap seleksi, peneliti melakukan observasi terseleksi, dan mengajukan pertanyaan kontras, yang dilakukan dengan analisis komponensial.

5. Hasil dari analisis komponensial, melalui analisis tema peneliti menemukan tema-tema budaya. Berdasarkan temuan tersebut, selanjutnya peneliti menuliskan laporan penelitian kualitatif.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis

Secara geografis wilayah Krayan memiliki luas wilayah 3.592,4 km^2. Topografi wilayahnya bervariasi, terdiri atas kawasan perbukitan terjal di sebelah Utara bagian Barat dengan 30,38% wilayahnya terletak di ketinggian 500 – 1.000 m, sebanyak 69,67% wilayahnya terletak di ketinggian 1.000 – 1.500 m, dan sisanya 0,05% wilayahnya berada di ketinggian 1.500 – 2000.

Letak geografis Krayan sangat strategis berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah dan Sarawak Malaysia Timur serta sangat dekat dengan Brunei Darussalam. Hal tersebut sangat menguntungkan masyarakat Krayan, baik dari segi perdagangan, jasa, maupun sektor lainnya.

Kecamatan Krayan memiliki curah hujan yang tinggi, dikarenakan sebagian besar wilayahnya masih berupa hutan tropis. Suhu udara di kecamatan ini juga relatif rendah dikarenakan sebagian besar wilayahnya berada di ketinggian lebih dari 1000 m. (Statistik Daerah Krayan 2015).

2. Kondisi Pemerintahan

Berdasarkan penelusuran alur sejarah maka eksistensi Krayan sebagai suatu wilayah pemerintahan dimulai sejak Pemerintah Belanda menugaskan Kiai Gramer sebagai Asisten Wedana pada tahun 1923 di

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Krayan yang berkedudukan di Long Sepayang. Kemudian pada tahun 1959 melalui pembentukan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang, maka ditetapkan perubahan Swapraja Bulongan menjadi Daerah Tingkat II Bulongan yang meliputi Kawedanan – Kawedanan : Bulongan, Tarakan, Tanah Tidung dan Apok Kayan hingga bergulirnya gerakan reformasi di Indonesia pada tahun 1998 yang kemudian mendorong transformasi sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralisitik melalui Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Dewan Presidium DOB Kabupaten Krayan, 2016).

Dengan semangat otonomi daerah maka melalui Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 Kecamatan Krayan menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Nunukan yang dibentuk dari sebagian wilayah Kabupaten Bulungan pada saat itu, yang terdiri atas Kecamatan :

1. Kecamatan Krayan;
2. Kecamatan Nunukan;
3. Kecamatan Sebatik;
4. Kecamatan Sembakung;
5. Kecamatan Lumbis.

Krayan merupakan wilayah yang terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Barat, Kecamatan Krayan Selatan, dan Kecamatan Krayan Tengah. Wilayah Krayan terdiri dari 89 desa. Kecamatan Krayan merupakan kecamatan tertua dari kecamatan yang ada di wilayah tersebut, sebab 4 (empat)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kecamatan lainnya merupakan hasil pemekaran dari kecamatan ini. Kecamatan Krayan terdiri dari 23 desa, Kecamatan Krayan Selatan terdiri dari 13 desa, Kecamatan Krayan Tengah terdiri dari 11 desa, Kecamatan Krayan Timur terdiri dari 17 desa, dan Kecamatan Krayan Barat terdiri dari 25 desa. Desa-desa dalam masing-masing kecamatan terdapat dalam tabel 4.1 terlampir.

3. Penduduk dan Tenaga Kerja

Berdasarkan catatan demografi, wilayah Krayan terdiri dari 19.007 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 5.16 jiwa per kilometer persegi. Secara keseluruhan, wilayah Krayan mencakup 3.592,4 km^2 dengan luas wilayah efektif mencapai 264,53 km^2. Berikut adalah tabel demografi berdasarkan kecamatan:

Tabel 4.2.

Data Kependudukan dan Luas Wilayah

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)
1	Krayan	105,558 km^2	5.376 jiwa	19,63 jiwa/km^2
2	Krayan Selatan	197,648 km^2	2.185 jiwa	136,20 jiwa/km^2
3	Krayan Tengah	174,405 km^2	3.187 jiwa	14,98 jiwa/km^2
4	Krayan Barat	114,021 km^2	5.053 jiwa	51,65 jiwa/km^2
5	Krayan Timur	25.005 km^2	3.206 jiwa	93,34 jiwa/km^2

Sumber : Data Monografi Kecamatan se-Krayan 2017

Penduduk asli daerah Krayan adalah suku Dayak Lundayeh. Penduduk asli tersebut mendominasi jumlah penduduk dengan persentase sebanyak 97,5%. Mayoritas penduduk Krayan beragama Kristen Protestan. Agama Kristen masuk ke Krayan sejak 1930-an dengan dipelopori misionaris barat. Pada 2016, jumlah penduduk beragama Kristen mencapai

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

18.048 orang sedangkan penduduk beragama Islam sebanyak 250 orang dan penduduk beragama Katolik sebanyak 251 orang.

Tingkat pertumbuhan penduduk Krayan dapat dikatakan lambat karena sebagian besar hanya berasal dari kelahiran di mana tingkat kelahiran dari pasangan usia subur diasumsikan sangat rendah. Peneliti mengambil sampel di lokasi / *cluster* desa Terang Baru, di mana jumlah penduduk pada lokasi tersebut sebanyak 1.021 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 442 KK. Penelitian ini menghubungkan jumlah rata-rata siswa SDN 009 Krayan sebagai peserta Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) selama 9 tahun terakhir sejak tahun 2009 – 2018 dengan jumlah Kepala Keluarga dalam lokasi Terang Baru, dimana dalam pengamatan tersebut ditemukan bahwa jumlah rata-rata peserta UASBN setiap tahunnya sebanyak 10 orang siswa.

Dalam wawancara yang dilakukan kepada Bapak T (Kepala Sekolah SDN 009 Krayan) bahwa jumlah rata-rata peserta UASBN tersebut merupakan jumlah murid masuk sekolah sejak awal, dengan angka putus sekolah atau pindah hampir tidak ada. Dari data tersebut disimpulkan bahwa jumlah siswa peserta UASBN sebanyak 10 orang dari 442 KK atau 1.021 jiwa penduduk Terang Baru, memiliki kaitan yang erat dengan jumlah kelahiran yang sangat rendah. Hal ini diperkuat dengan data statistik yang dilansir oleh BPS dalam publikasi Kecamatan Krayan Dalam Angka 2017, bahwa jumlah akseptor KB aktif terhadap Pasangan Usia Subur di Kecamatan Krayan Tahun 2012 – 2016 terlihat sebagai berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.3.

Persentase Akseptor Keluarga Berencana (KB) aktif terhadap Pasangan Usia Subur di Kecamatan Krayan Tahun 2012 – 2016

Jenis Alat Kontrasepsi	2012	2013	2014	2015	2016
PUS	1.257	1.280	1.280	1.208	1.196
Akseptor Aktif	1.776	937	937	285	1.214
Persentase Akseptor Aktif terhadap PUS	70,78%	73,20%	73,20%	23,59%	101,50%

Sumber : Kecamatan Krayan Dalam Angka 2017

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah siswa peserta UASBN yang sedikit sangat dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kelahiran penduduk yang dikarenakan persentase akseptor KB aktif dari Pasangan Usia Subur sangat tinggi, yaitu mencapai 101,50 persen pada tahun 2016.

Dalam wawancara yang dilakukan kepada beberapa orang ibu muda di lokasi Terang Baru yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa alasan utama mereka aktif mengikuti KB adalah tidak mau repot mengurus anak dan ingin menikmati keleluasaan bergaya di masa muda. Alasan ini merupakan sebuah tantangan besar bagi pemerintah dalam memperkuat demografi di kawasan perbatasan karena berkaitan dengan paradigma para pasangan muda terutama di kalangan ibu-ibu muda.

Masyarakat Krayan hidup berdampingan dengan adat-istiadat lokal. Hukum adat mengatur berbagai kehidupan bermasyarakat. Hukum adat berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat lokal dan warga pendatang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

agar dapat hidup berdampingan dengan sesama manusia dan alam sekitar. Selain itu, hukum adat juga digunakan sebagai sarana penyelesaian konflik atau sengketa di antara anggota masyarakat.

Hukum adat menciptakan masyarakat adat yang kemudian membentuk lembaga-lembaga adat. Selain itu, terdapat juga organisasi kemasyarakatan lainnya seperti Karang Taruna dan organisasi berbasis keagamaan serta jender. Pada 2016, Krayan memiliki 277 organisasi kemasyarakatan sebagaimana pada lampiran tabel 4.4.

4. Kondisi Pertanian

Penduduk Krayan didominasi masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Jumlah petani di Krayan mencapai 78%. Umumnya, petani Krayan menanam padi yang menghasilkan beras organik jenis Adan dan merupakan produk unggulan Krayan. Beras Adan terdiri dari tiga varian yaitu Adan Putih, Hitam, dan Merah. Beras Adan ditanam dengan metode khas Krayan yang memerlukan waktu selama satu tahun. Artinya, dalam satu tahun, beras Adan hanya dapat dipanen sebanyak satu kali. Metode penanaman tersebut menghasilkan beras Adan yang wangi dan pulen. Dalam satu kali panen, setiap hektar sawah mampu menghasilkan beras Adan sebanyak kurang lebih 3 ton. Berikut tabel potensi pertanian Padi Adan di Krayan:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.5

Potensi Pertanian Krayan

No	Wilayah	Luas Persawahan (Ha)	Hasil Panen (Ton/Ha)
1	Krayan	806, 21	7.479 ton
2	Krayan Selatan	494, 49	1.401 ton
3	Krayan Tengah	394, 71	381 ton
4	Krayan Barat	1.350, 84	8.413,2 ton
5	Krayan Timur	350, 62	1.096,5 ton
Total		**6.256, 9**	**18.770,7 ton**

Sumber: Data Monografi Kecamatan se-Krayan 2016

Pada musim panen, harga jual rata-rata beras Adan dari petani ke pengepul asal Malaysia adalah 20.000 rupiah per kilogram. Dengan demikian, pada masa panen, petani Krayan berpotensi menghasilkan pendapatan total lebih dari 375 milyar rupiah. Selain itu, ada pula produk unggulan Krayan lainnya yaitu :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.6

Potensi Tanaman Pangan Krayan selain Padi

No.	Jenis Tanaman	Krayan		Krayan Selatan		Krayan Tengah		Krayan Barat		Krayan Timur		Total	
		Luas (Ha)	Hasil (Ton)	Luas (Ha)	Hasil (Ton)	Luas (Ha)	Hasil (Ton)	Luas (Ha)	Hasil (Ton)	Luas (Ha)	Hasil (Ton)	Ha	Ton
1	Binabud	3	2,4	1	0,8	87	69,6	3	2,4	0,5	0,4	**94,5**	**75,6**
2	Jagung	23	18,4	36	28,8	17	13,6	23	18,4	3,5	2,8	**102,5**	**82**
3	Kacang Tanah	12	7,2	2	1,2	0	0	12	7,2	2	1,2	**28**	**16,8**
4	Sayur-Mayur	6,6	3,3	1	0,5	0	0	6,6	3,3	0	0	**14,2**	**7,1**

Sumber: Data Monografi Kecamatan se-Krayan 2016

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Selain beras Adan, Binabud juga merupakan produk pertanian yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Pada musim panen, harga jual Binabud yang sudah dikupas atau digiling dari petani Krayan ke pengepul asal Malaysia mencapai 40 ringgit/gantang atau sekitar 12 ringgit per kilogram. Artinya, dalam sekali panen, para petani Krayan berpotensi memperoleh pendapatan sebesar 907.200 ringgit atau sekitar 3 milyar rupiah. Jumlah tersebut terbilang sedikit karena para petani hanya menanam binamud sebagai selingan di masa tanam padi dengan memanfaatkan sisa lahan yang tersedia. Terdapat juga lahan yang ditanami cengkeh, vanili, tebu, kopi dan gaharu. Selain komoditas-komoditas tersebut, Krayan juga dikenal sebagai daerah penghasil buah-buahan lokal seperti durian, jeruk, duku, nanas, dan langsat.

5. Infrastruktur dan Transportasi

Posisi geografis Kecamatan Krayan yang terletak jauh dari kecamatan lainnya dan belum adanya jalur darat untuk mencapai kecamatan ini, menyebabkan hanya jalur udara saja yang bisa digunakan untuk mencapai Kecamatan Krayan. Kecamatan Krayan memiliki 7 bandara yang terdiri dari 1 bandara domestik dan 6 bandara perintis.

Tabel 4.7
Nama Bandara, Panjang Landasan dan Kekuatan

No.	Bandara	Panjang	Kekuatan
1	Yuvai Semaring	1600	C-212
2	Long Layu	1000	C-185
3	Pa Upan	900	C-185
4	Long Rungan	750	C-185
5	Long Padi	350	C-185
6	Binuang	750	C-185
7	Bungayan	350	C-185

Sumber : Kantor Camat Krayan, 2018.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Konektivitas antar desa dalam wilayah Krayan menjadi ruas jalan yang masuk dalam tanggungjawab pemerintah Kabupaten Nunukan. Adapun daftar ruas dan panjang jalan Kabupaten di Krayan adalah sepanjang 107 km seperti terdapat pada Tabel 4.8, dengan panjang ruas berdasarkan jenis perkerasannya adalah aspal 6 km, agregat 6 km dan tanah 95 km (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan, 2016).

6. Tata Ruang

Tata ruang Krayan diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan. RTRW berfungsi sebagai arah struktur dan pola ruang pemanfaatan sumberdaya dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang di Kabupaten. RTRW juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang (Perda RTRW Kabupaten Nunukan, 2013).

Beberapa hal yang telah diatur tentang Krayan dalam RTRW Kabupaten Nunukan adalah :

1. Rencana pembangunan terminal penumpang Tipe B berada di Long Midang Kecamatan Krayan dan Mansalong Kecamatan Lumbis;
2. Krayan memiliki sistem jaringan transportasi udara yang termasuk dalam hirarki bandar udara berupa bandar udara pengumpang, yaitu :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1) Bandar Udara Yuvai Semaring Kecamatan Krayan
2) Bandar Udara Long Layu Kecamatan Krayan Selatan

3. Krayan juga memiliki Bandara Khusus Perbatasan Darat, yaitu :
   1) bandar udara khusus Binuang di Kecamatan Krayan Selatan;
   2) bandar udara khusus Kampung Baru di Kecamatan Krayan;
   3) bandar udara khusus Kurid di Kecamatan Krayan;
   4) bandar udara khusus Lembudud di Kecamatan Krayan;
   5) bandar udara khusus Berian Baru di Kecamatan Krayan;
   6) bandar udara khusus Pa' Upan di Kecamatan Krayan;
   7) bandar udara khusus Buduk Kubul di Kecamatan Krayan;
   8) bandar udara khusus Long Rungan di Kecamatan Krayan Selatan; dan
4. Di bidang energi akan dibangun sistem jaringan energi berupa pengembangan wilayah usaha PT. PLN (Persero) Area Berau Ranting Nunukan di wilayah perbatasan Kecamatan Krayan dan sekitarnya dengan pembukaan Unit layanan Listrik PLN di Krayan.
5. Daerah Irigasi (DI) di Krayan yang merupakan kewenangan Kabupaten berdasarkan Kepmen PU Nomor 390 Tahun 2007 tentang Status Dearah Irigasi yang telah diperbaharui, dan Badan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Wilayah Sungai (BWS) Wilayah III Kalimantan Timur terdiri atas :

1) DI Berian Baru seluas kurang lebih 303.00 (tiga ratus tiga) hektar berada di Kecamatan Krayan;
2) DI Long Api seluas kurang lebih 100.00 (seratus) hektar berada di kecamatan Krayan;
3) DI Pa'Nado seluas kurang lebih 200.00 (dua ratus) hektar berada dikecamatan Krayan; dan
4) DI Pa'Rupai seluas kurang lebih 150.00 (seratus lima puluh) hektar berada di kecamatan Krayan.

6. Sistem Jaringan Air Minum terdiri atas :
   1) Pengolahan dan pipanisasi air bersih pada sungai-sungai Kecamatan Krayan;
   2) Pengolahan dan pipanisasi air bersih pada sungai-sungai Kecamatan Krayan Selatan; dan
7. Pola Ruang wilayah Krayan terdiri atas :
   1) Kawasan Lindung

      Kawasan Lindung tersebut berada di Kecamatan Krayan (Krayan, Krayan Timur dan Krayan Barat) seluas 6.470,2 hektar dan di Krayan Selatan (Krayan Selatan dan Krayan Tengah) seluas 34.575,4 hektar.

      Selain itu, termasuk dalam kategori hutan lindung terdapat kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yaitu Taman Nasional Kayan Mentarang seluas 303.637 hektar meliputi Krayan, Krayan Selatan dan Lumbis Ogong.

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan berupa kampung adat dan situs unggulan berskala kabupaten meliputi :

- rumah adat Tanjung Karya berada di Kecamatan Krayan;
- rumah adat Tang Laan berada di Kecamatan Krayan Selatan;
- rumah adat Pa' Upan berada di Kecamatan Krayan Selatan;
- rumah adat Terang Baru berada di Kecamatan Krayan;
- rumah adat Binuang berada di Kecamatan Krayan Selatan; dan
- Batu Sicien berada di Tang Paye di Kecamatan Krayan Selatan.

2) Kawasan Budidaya

Termasuk dalam Kawasan Budidaya di Krayan telah terdapat beberapa kawasan peruntukan dengan komoditas unggulan berupa :

- Kawasan Peruntukan Perkebunan di Krayan dan Krayan Selatan dengan komoditas unggulan, vanili, karet, kopi dan tebu.
- Kawasan Peruntukan Peternakan dengan komoditas unggulan kerbau, ayam dan itik di Krayan dan Krayan Selatan.
- Kawasan Peruntukan Pertambangan dengan komoditas mineral logam berupa emas, bauksit, besi dan nikel di Krayan dan Krayan Selatan.
- Kawasan Peruntukan Pertambangan dengan komoditas mineral bukan logam berupa batu

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

gunung, pasir, sirtu, batu gamping, pasir kuarsa, dan batu bara muda di Krayan dan Krayan Selatan.

- Kawasan Peruntukan Pariwisata Budaya di Long Layu, Long Umung dan Long Midang. Sedangkan Pariwisata Alam berupa kawasan ekowisata Taman Nasional Kayan Mentarang di Krayan dan Krayan Selatan.
- Kawasan Peruntukan Permukiman berupa kawasan permukiman pedesaan tersebar di Krayan dan Krayan Selatan.
- Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan yang terdiri dari kawasan strategis hankam dengan radius 5 (lima) km sepanjang perbatasan darat berada di Krayan dan Krayan Selatan. Sedangkan kawasan pemeriksaan dan pelayanan pertahanan keamanan yang terdiri dari Pos Gabungan TNI dan Pos Pengamanan Perbatasan berada di Long Midang, Long Layu dan Pa Pani (Perda RTRW Kabupaten Nunukan, 2013).

Dalam RTRW Provinsi Kalimantan Utara, wilayah perbatasan Krayan diatur sebagai :

a. Pusat Kegiatan Perkotaan yang meliputi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Long Bawan, Long Layu, Krayan Timur, Krayan Barat dan Krayan Tengah.
b. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Long Midang.
c. Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Provinsi berada di Krayan dan Krayan Selatan.
d. kawasan perbatasan dengan kegiatan utama ekonomi berada di :
    1) Long Bawan
    2) Long Layu
    3) Long Midang dan Pa Rupai Kecamatan Krayan berupa *Krayan Border Trade Center* (KBTC); dan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4) Padat Karya Kecamatan Krayan Barat berupa *Krayan Border Shop* (KBS).

5) Pa Tera Kecamatan Krayan Selatan berupa kawasan *Technopark* Pertanian Organik (Perda RTRW Provinsi Kalimantan Utara,

Menurut RTRW Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan, wilayah Krayan dinyatakan sebagai :

a. Kawasan perbatasan darat.
b. Memiliki sistem jaringan transportasi jalan kolektor primer meliputi: Malinau – Long Bawan – Batas Negara.
c. Memiliki Bandar Udara Umum yeng terdiri dari Bandar Udara Pengumpan yaitu Bandar Udara Yuvai Semaring di Long Bawan Kecamatan Krayan dan Bandar Udara Long Layu di Krayan Selatan.
d. Unit Distribusi Air ditetapkan di Kecamatan Krayan dan Kecamatan Krayan Selatan.
e. Sebagai Zona Lindung 1 (L1) karena memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan tujuan mencegah erosi, menjaga fungsi hidrologis tanah dan memberikan ruang yang cukup untuk peresapan air hujan.
f. Khusus Kecamatan Krayan sebagai Zona Budidaya 1 (B1) karena memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang, kualitas

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

prasarana dan sarana sosial dengan tingkat pelayanan tinggi, kualitas prasarana dan sarana di bidang pertahanan dan keamanan negara dengan tingkat pelayanan tinggi, serta bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi baik vertikal maupun horizontal.

g. Sebagai Zona Budidaya 2 (B2) karena merupakan zona permukiman perdesaan dengan karakteristik memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang, kualitas prasarana dan sarana sosial dengan tingkat pelayanan sedang, kualitas prasarana dan sarana di bidang pertahanan dan keamanan negara dengan tingkat pelayanan sedang, dan bangunan gedung dengan intensitas sedang baik vertikal maupun horizontal.

h. Sebagai Zona Budidaya 3 (B3) karena merupakan zona pertanian dengan karakteristik sebagai Kawasan Budi Daya yang dikembangkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara, memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah serta prasarana dan sarana pertanian.

i. Sebagai Zona Budidaya 3 (B3) dengan kawasan peruntukan pertanian hortikultura ditetapkan Krayan dan Krayan Selatan.

j. Sebagai Zona Budidaya 3 (B3) dengan kawasan peruntukan perkebunan ditetapkan di Kecamatan Krayan. (Perpres 31 Tahun 2015).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

7. Kesehatan

Sampai saat ini, pemerintah belum dapat menyediakan fasilitas kesehatan yang cukup di wilayah Krayan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan akses kesehatan yang memadai, masyarakat Krayan harus menyewa pesawat perintis untuk mengangkut penderita sakit dari Krayan ke wilayah kota lain. Selain itu sebagian masyarakat Krayan lebih memilih berobat ke Malaysia karena fasilitas dan biaya yang lebih mudah dijangkau. Berikut ini adalah tabel ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis di Krayan:

Tabel 4.9.

Ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Medis di Krayan

No	Fasilitas Kesehatan/ Tenaga Medis	Krayan	Krayan Selatan	Krayan Tengah	Krayan Barat	Krayan Timur
1	Rumah Sakit	0	0	0	1 unit	0
2	Puskesmas	1 unit	1 unit	0	0	0
3	Puskesmas Pembantu	4 unit	1 unit	3 unit	3 unit	5 unit
4	Tempat Penyimpanan Obat	1 unit	1 unit	0	0	0
5	Dokter Umum	2	1 orang	0	0	0
6	Paramedis	20 org	18 org	1 orang	3 orang	3 orang
7	Dukun Terlatih	4 orang	0	3 orang	4 orang	2 orang
8	Bidan Desa	10 org	5 orang	7 orang	10 org	4 orang

Sumber: Data Monografi Kecamatan se-Krayan 2016

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

8. Pendidikan

Fasilitas pendidikan dan jumlah tenaga pengajar di perbatasan Krayan masih sangat minim. Fasilitas dan tenaga pendidik di Krayan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.10.

Ketersediaan Fasilitas Pendidikan

No	Fasilitas Pendidikan	Jumlah	Penduduk Usia Sekolah
1	SD	21	1772
2	SMP	7	826
3	SMA/sederajat	6	843

Sumber: Data Monografi Kecamatan se-Krayan 2016

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Krayan

1. Analisis dari perspektif Geografis

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak YS (Camat Krayan Barat), diperoleh hasil bahwa Krayan memiliki luas wilayah 3.592,4 km^2. Topografi wilayahnya bervariasi, terdiri atas kawasan perbukitan terjal di sebelah Utara bagian Barat dengan 30,38% wilayahnya terletak di ketinggian 500 – 1.000 m, sebanyak 69,67% wilayahnya terletak di ketinggian 1.000 – 1.500 m, dan sisanya 0,05% wilayahnya berada di ketinggian 1.500 – 2000.

Letak geografis Krayan sangat strategis berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah dan Sarawak Malaysia Timur serta sangat dekat dengan Brunei Darussalam. Hal tersebut sangat menguntungkan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

masyarakat Krayan, baik dari segi perdagangan, jasa, maupun sektor lainnya.

Kecamatan Krayan memiliki curah hujan yang tinggi, dikarenakan sebagian besar wilayahnya masih berupa hutan tropis. Suhu udara di kecamatan ini juga relatif rendah dikarenakan sebagian besar wilayahnya berada di ketinggian lebih dari 1.000 m.

Keterangan tersebut juga didukung oleh Bapak TH (Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan) bahwa Wilayah Krayan merupakan daerah yang terbentang di sepanjang tapal batas darat dengan Malaysia yang memiliki 5 (lima) pintu masuk *(entry point)* di mana 4 (empat) pintu berbatasan dengan negara bagian Sarawak dan 1 (satu) pintu berbatasan dengan negara bagian Sabah Malaysia. Adapun pintu masuk dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Long Midang, Kecamatan Krayan : merupakan pintu masuk dari Ba' Kelalan bagian Sarawak Malaysia. Pintu ini merupakan jalur utama yang digunakan oleh masyarakat secara turun temurun di Kecamatan Krayan sebagai jalur transportasi dan distribusi ekonomi dalam menunjang kebutuhan utama masyarakat Krayan dengan cara memasarkan hasil bumi dan membeli kebutuhan pokok seperti sembako, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan material bangunan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Lembudud, Kecamatan Krayan Barat : berbatasan dengan Bario, Sarawak (Malaysia)

c. Tanjung Karya, Kecamatan Krayan Barat : berbatasan dengan Pa Depur, Sarawak (Malaysia).

d. Long Layu, Kecamatan Krayan Selatan : berbatasan dengan Pa' Dallih, Sarawak (Malaysia), dan

e. Pa' Pani, Kecamatan Krayan Timur : berbatasan dengan Long Pasia di bagian Sabah (Malaysia).

Dengan kondisi wilayah Krayan tersebut menyebabkan ketergantungan sosial ekonomi masyarakat Krayan sangat tinggi kepada Malaysia, maka secara langsung menimbulkan dampak-dampak sebagai berikut :

a. Pintu-pintu masuk yang ada di perbatasan Krayan dengan Malaysia rentan terhadap infiltrasi dari luar karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki terutama dalam hal pengawasan dan pengamanan wilayah.

b. Rendahnya kesejahteraan rakyat karena rendahnya dinamika ekonomi di perbatasan sebagai akibat belum tersedianya sarana pasar sebagai instrumen peningkatan ekonomi masyarakat perbatasan. Oleh karena belum tersedianya pasar perbatasan sebagai wadah pemasaran maka masyarakat menjual hasil pertaniannya secara langsung ke Malaysia secara tradisional. Hal ini menyebabkan lemahnya daya jual

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

masyarakat oleh karena mekanisme pasar yang dikendalikan sepenuhnya oleh pembeli di negara Malaysia.

c. Adanya ancaman akan menurunnya Nasionalisme dan rasa bangga akan ke – Indonesia – an karena rendahnya daya saing dan kesejahteraan masyarakat Indonesia di perbatasan.

d. Masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sembako, BBM dan material bangunan karena jalur distribusi barang dari Malaysia dikendalikan sepenuhnya oleh pihak Malaysia.

Menyikapi kondisi daerah perbatasan sebagaimana dimaksud di atas maka diperlukan tindakan nyata dan cepat dari pemerintah untuk menghadirkan peran negara dalam kesulitan dan ancaman isu nasionalisme dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan melalui pembentukan Daerah Otonomi Baru di wilayah Krayan.

Dari data-data di atas, apabila dihubungkan dengan tipologi Martinez dalam Tirtosudarmo (2002) yang dikutip dari Arifin (2015) yang mengatakan bahwa wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia termasuk dalam tipe perbatasan yang disebut *coexistent borderland* dan *interdependent borderland.*

Coexistent borderland yaitu suatu wilayah perbatasan di mana konflik lintas batas bisa ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang penyelesaiannya berkaitan dengan masalah kepemilikan sumber daya yang strategis di perbatasan. Sedangkan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

interdependent borderland adalah suatu wilayah perbatasan yang di kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan terlibat dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah.

Letak wilayah Krayan yang strategis di perbatasan darat Indonesia dan Malaysia menjadikannya resisten terhadap potensi konflik kepentingan di perbatasan memperebutkan kesempatan dan peluang ekonomi perdagangan antar negara, meskipun penduduk di Krayan dan Ba Kelalan / Lawas (Malaysia) sudah memiliki hubungan dagang yang saling membutuhkan. Dengan kemajuan infrastruktur perbatasan di wilayah Indonesia menuju tapal batas sejak tahun 2017 menjadikan Krayan semakin mudah dimasuki dengan menggunakan kendaraan roda empat untuk membawa masuk barang-barang dagangan seperti sembako dan material bangunan bahkan barang-barang lainnya termasuk barang illegal seperti minuman keras dan narkotika. Karena itu pendekatan fungsi perbatasan yang disampaikan oleh Van Well, (2006) dalam Zamzami (2016) sebagai simbol identitas, lambang identias suatu wilayah/bangsa/negara, harus difungsikan semaksimal mungkin, agar kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah perbatasan Krayan benar-benar terwujud. Oleh karena itu seperti dikemukakan oleh STP (Kepala Biro Pengelola Perbatasan Daerah, Provinsi Kalimantan Utara sekaligus Ketua Lembaga Percepatan,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Perluasan Pembangunan Perbatasan Krayan) mengatakan diperlukan strategi pembangunan kawasan perbatasan dengan mendorong pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah di perbatasan Krayan berbasis pada pertanian melalui pembangunan *Technopark* Pertanian Organik, membuka keterisolasian kawasan dan membangun infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih dan sarana transportasi dan komunikasi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan membangun sarana pendidikan, kesehatan, pertanian dan ekonomi, meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor dengan mempercepat pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Pos Pamtas di Long Midang, membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Krayan, mereformasi pelayanan publik di Krayan, menerapkan kebijakan desentralisasi asimetris untuk kawasan perbatasan (Krayan), meningkatkan kualitas pengaturan, pembinaan, pemanfaatan, dan pengawasan rencana tata ruang daerah perbatasan, menjaga kawasan perbatasan dengan menyelesaikan batas wilayah, menanamkan nilai – nilai nasionalisme yang tinggi kepada masyarakat.

Selain itu, menurut Bapak LGP (Kepala Adat Besar Krayan Hulu sekaligus sebagai Presiden FORMADAT Indonesia), bahwa potensi sumber daya yang khas di wilayah perbatasan darat Indonesia dan Malaysia yang sama-sama dipunyai kedua sisi masyarakat di perbatasan seperti Beras Adan di sektor pertanian, adat istiadat dan atraksi budaya di sektor kebudayaan, keindahan alam dan ekowisata di sektor pariwisata

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mendorong adanya inisiatif kerjasama antar masyarakat adat di perbatasan dengan membentuk Forum Masyarakat Dataran Tinggi Borneo (FORMADAT) sebagai wadah perumusan kebijakan dan kerjasama promosi dan pemasaran potensi kawasan yang dimiliki bersama. Hal ini sejalan dengan Mangiri dan Widiati dalam Alkadri, dkk, (1999) yang dikutip oleh Zamzami (2016), salah satu konsep pengembangan wilayah adalah pengembangan wilayah berbasis sumber daya. Konsep ini juga dapat dikembangkan menjadi *Local Economic Development* (LED), karena LED memiliki ciri utamanya, adanya kebijakan-kebijakan *endogenous development* yang menggunakan potensi lokal sumber daya manusia, institusi dan sumber daya alam, Blakely dalam Pamungkas, (2004:37).

Sumber daya alam juga menjadi kekuatan bagi daerah untuk mengembangkan wilayah, sehingga apabila dikelola dengan baik, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang program pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, akan tetapi pengelolaan sumber daya alam secara besar-besaran yang dilakukan akan menimbulkan kerusakan. Blakely dalam Pamungkas, (2004:37).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Analisis dari perspektif Pemerintahan

Menurut FG (Camat Krayan Timur) bahwa Krayan terdiri 5 (lima) Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Krayan Tengah, Kecamatan Krayan Timur dan Kecamatan Krayan Barat. Pembentukan kecamatan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Krayan Tengah Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan dimana kecamatan Krayan Tengah merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Krayan Selatan. Sedangkan Pembentukan Kecamatan Krayan Timur dan Krayan Barat merupakan hasil dari pemekaran Kecamatan Krayan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Krayan Timur dan Kecamatan Krayan Barat Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan.

Lebih lanjut dikemukakan oleh TH (Ketua Dewan Presidium Pembentukan Kabupaten Krayan) bahwa pemekaran kecamatan tersebut didorong oleh semangat untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat Krayan yang tersebar di sepanjang wilayah perbatasan serta untuk mendorong percepatan dan perluasan pembangunan perbatasan yang saat ini masih sangat tertinggal dibanding wilayah-wilayah lainnya di Indonesia apalagi jika dibandingkan dengan negara tetangga. Kondisi tersebut juga mendorong masyarakat untuk menyampaikan usulan pemekaran wilayah Krayan menjadi Kabupaten terpisah dari Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Nunukan. Alasan rentang kendali pemerintahan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang sangat jauh dari ibukota Kabupaten dan luasnya wilayah kabupaten induk menjadi salah satu alasan utama karena sangat mempengaruhi lambatnya pembangunan perbatasan Krayan serta kondisi Krayan yang berdekatan dan berbatasan langsung dengan Sarawak, Sabah dan Brunei Darussalam menambahkan nilai strategis Krayan untuk dimekarkan karena menjadi *barrier* dan sebagai citra kedaulatan bangsa karena akan meningkatkan daya saing Indonesia di mata internasional.

Sejalan dengan usulan pemekaran di atas, pendapat Pheni Chalid, (2007:9.27), dalam Zamzami mengatakan bahwa" pengembangan wilayah pada masa desentralisasi cenderung diartikan sebagai pemekaran wilayah yang pada dasarnya memiliki muatan politis yang kental, dan pemekaran wilayah lebih pada upaya mengakomodasi elit-elit di daerah agar desentralisasi tidak terjebak pada disintegrasi. Pendapat demikian tidak sepenuhnya dapat dibenarkan, karena kedua wilayah tersebut lebih domain pada nilai kepentingan strategis dan kesejahteran masyarakat". Namun demikian, pendapat Pheni Chalid, (2007:9.27) yang mengatakan bahwa hingga saat ini, asumsi pengembangan wilayah masih berkutat pada paradigma lama yaitu pembangunan fisik sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan, sedangkan pembangunan manusia hingga saat ini belum menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan dapat dibenarkan.

Oleh karena itu pertimbangan untuk meletakkan pemerintahan yang otonom di wilayah Krayan harus benar-benar dengan pertimbangan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang komprehensif untuk kepentingan strategis nasional dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia di perbatasan.

3. Analisis dari perspektif Penduduk dan Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan MK (Camat Krayan Selatan), H (Camat Krayan Tengah), FG (Camat Krayan Timur) dan YS (Camat Krayan Barat) serta RDF (Sekcam Krayan) bahwa pertumbuhan penduduk di Krayan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan angka jumlah penduduk terjadi karena beberapa perpindahan tenaga kerja dan pendatang dari luar Krayan serta hasil pendataan ulang terhadap penduduk Krayan yang tinggal di luar Krayan terutama di Malaysia sejak belasan bahkan puluhan tahun yang lalu tapi belum memiliki status kewarganegaraan Malaysia. Bagaimana pun mereka adalah warga negara Indonesia yang telah merantau lama yang tidak mendapat pengakuan sebagai warga negara di Malaysia, sehingga harus mendapat pengakuan dan perlindungan dari negaranya sendiri.

Berdasarkan catatan demografi, wilayah Krayan terdiri dari 19.007 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 5.16 jiwa per kilometer persegi. Secara keseluruhan, wilayah Krayan mencakup 3.592,4 km^2 dengan luas wilayah efektif mencapai 264,53 km^2.

Penduduk asli daerah Krayan adalah suku Dayak Lundayeh. Penduduk asli tersebut mendominasi jumlah penduduk dengan persentase sebanyak 97,5%. Mayoritas penduduk Krayan beragama Kristen Protestan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Agama Kristen masuk ke Krayan sejak 1930-an dengan dipelopori Misionaris Barat. Pada 2016, jumlah penduduk beragama Kristen mencapai 18.048 orang sedangkan penduduk beragama Islam sebanyak 250 orang dan penduduk beragama Katolik sebanyak 251 orang.

Masyarakat Krayan hidup berdampingan dengan adat-istiadat lokal. Hukum adat mengatur berbagai kehidupan bermasyarakat. Hukum adat berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat lokal dan warga pendatang agar dapat hidup berdampingan dengan sesama manusia dan alam sekitar. Selain itu, hukum adat juga digunakan sebagai sarana penyelesaian konflik atau sengketa di antara anggota masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pendapat Pheni Chalid, (2007:9.27) bahwa pengembangan wilayah pada hakikatnya adalah pengembangan daerah yang bersifat menyeluruh, artinya pembangunan tidak hanya menyentuh aspek pengembangan fisik, tetapi yang lebih prinsip adalah upaya memaksimalkan potensi sumber daya manusia agar dapat mengelola sumber daya absolut yang dimiliki daerahnya secara baik. Sehingga dalam kerangka itu menurut STP (Karo BPPD Kaltara) agar seluruh komponen masyarakat yang ada di perbatasan dapat memberikan beberapa dukungan sebagai strategi pengembangan wilayah perbatasan, yaitu mendukung kebijakan pemerintah di Krayan, memperkuat kelembagaan ekonomi desa melalui koperasi, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan daerah, mendukung pembentukan DOB Kabupaten Krayan, meningkatkan kapasitas melalui pendidikan dan latihan sehingga dapat memanfaatkan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

potensi lokal secara bijak, berdaya saing dan berwawasan lingkungan, senantiasa menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta mencintai dan menggunakan produk dalam negeri.

4. Analisis dari perspektif Infrastruktur dan Transportasi

Wawancara peneliti dengan bapak STP (Karo BPPD Provinsi Kalimantan Utara) mengatakan bahwa kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di Krayan masih sangat minim dan memprihatinkan. Selanjutnya menurut MK (Camat Krayan Selatan) mengatakan kelima kecamatan yang ada terkoneksi oleh ruas jalan lingkar Krayan, tapi kondisinya berupa jalan tanah yang rusak parah dan berlumpur. Jembatan yang ada terbuat dari kayu bulat yang disusun lalu ditimbun tanah. Belum ada jembatan yang terbuat dari beton atau kerangka baja seperti layaknya jembatan permanen.

Sampai saat ini masih ada beberapa desa yang belum memiliki akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda dua dan empat, seperti desa Wa Yagung, Bungayan dan Pa Raye di Kecamatan Krayan Timur, sedangkan di Krayan (induk) masih ada 2 desa yang belum dapat dijangkau kendaraan roda empat yaitu desa Pa Padi dan desa Cinglat. Keterangan Bapak W (Sekdes Wa Yagung) dikuatkan oleh Bapak M (Tokoh masyarakat Bungayan), bahwa untuk mengangkut kebutuhan sembako menuju desa mereka harus menggunakan tenaga kerbau dengan berjalan kaki sekitar 6 jam dengan mendaki dan menuruni gunung sampai di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut (mdpl). Ditambahkan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pula bahwa untuk mengevakuasi orang sakit ke Puskesmas Long Bawan tak jarang mereka harus menandu pasien tersebut melalui jalan setapak membelah hutan karena tak ada pilihan lain selain dibawa dengan tandu melalui jalur tersebut.

Krayan sebagai daerah yang hanya dapat dijangkau dengan pesawat udara dari wilayah perkotaan di Indonesia, memiliki beberapa bandar udara seperti bandar udara Yuvai Semaring di Long Bawan Kecamatan Krayan Induk dan bandar udara Long Layu di Kecamatan Krayan Selatan. Selain itu terdapat pula beberapa bandar udara jenis perintis di Binuang, Long Padi, Long Rungan, Pa Upan dan Bungayan. Bandar udara perintis ini hanya dapat didarati pesawat berukuran kecil jenis MAF (Cesna dan Kodiak) dan Susi Air jenis Pilatus.

Bandar Udara Yuvai Semaring sebenarnya dibangun untuk dapat didarati pesawat jenis ATR 72 namun sampai saat ini belum dapat terealisasi oleh karena kondisi landasannya yang kurang kuat. Berdasarkan wawancara peneliti kepada Bapak B (Kepala Bandara Yuvai Semaring) bahwa dalam waktu dekat direncanakan akan didarati dengan ATR 42-300 milik maskapai XpressAir dengan kapasitas penumpang 42 orang. Harapan masyarakat perbatasan di Krayan sangat tinggi terhadap rencana tersebut mengingat pelayanan penerbangan perintis bersubsidi dengan maskapai Avia Star (jenis twin otter) dan Susi Air (jenis grand caravan) tidak dapat mengimbangi tingginya animo masyarakat menggunakan moda transportasi udara.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Selain infrastruktur jalan dan jembatan dan transportasi udara yang masih sangat minim di Krayan, ketersediaan infrastruktur kesehatan, sarana pendidikan, listrik dan telekomunikasi masih sangat minim. Di bidang kesehatan baru terdapat 2 (dua) Puskesmas masing-masing di Long Bawan Kecamatan Krayan Induk dan Long Layu Kecamatan Krayan Selatan. Selebihnya di beberapa desa baru dilayani dengan beberapa buah Pustu. Di Krayan Barat telah dibangun Rumah Sakit Pratama pada tahun 2016 namun sampai saat ini belum digunakan oleh karena kekosongan Sumber Daya Manusia dan alat kesehatan di dalamnya. Demikian juga halnya dengan bidang pendidikan, beberapa sekolah masih menggunakan bangunan tua yang dibangun sejak zaman SD Inpres. Ada beberapa sekolah yang dibangun namun tidak dilengkapi dengan meubelairnya sehingga bangunan tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk proses belajar siswa.

Akses masyarakat perbatasan terhadap suplay listrik juga masih sangat rendah. Sejak tahun 2015 beberapa desa di Kecamatan Krayan Induk telah menikmati akses terhadap pelayanan listrik PLN, namun sebagian besar masyarakat di wilayah Krayan lainnya belum sama sekali menikmati listrik. Begitu juga halnya dengan akses terhadap layanan telekomunikasi. Sejak tahun 2017 hampir seluruh desa di Krayan telah dijangkau jaringan telekomunikasi dengan operator PT. TELKOMSEL. Namun demikian, dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini kebutuhan akan tersedianya paket jaringan data hampir menjadi kebutuhan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

utama bagi masyarakat mengingat hampir seluruh proses transaksi informasi, dokumen dan layanan publik dilakukan secara online dengan dukungan jaringan paket data. Hal ini kemudian yang menjadi masalah bagi masyarakat di perbatasan Krayan karena kapasitas *bandwitch* yang terbangun sangat kecil dan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di perbatasan sehingga masyarakat di perbatasan sangat tergantung dengan fasilitas di negara tetangga.

Guna membangun infrastruktur di wilayah perbatasan yang belum memadai tersebut, maka pengembangan wilayah dapat dilakukan dengan pendekatan Wu, (2001) yaitu pengembangan dengan basis infrastruktur (*Infrastructure-Led Development*) yang melibatkan pemerintah dan agen perencanaan, sehingga pembangunan infrastruktur yang dilakukan dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Pendekatan ini biasa dilakukan dengan alasan lokasi yang terpencil (*remote area*), politik maupun alasan keamanan Wu, (2001). Oleh sebab itu pemerintah daerah diharapkan dapat membangun infrastruktur dasar dengan menyediakan akses dasar tersebut bagi masyarakat di wilayah pedalaman perbatasan Krayan.

Sebagaimana diketahui melalui penelitian ini bahwa infrastruktur dasar yang masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat di perbatasan adalah jalan raya, jalan tani, jembatan, rumah sakit/puskesmas/pustu, sekolah, listrik, air bersih, akses telekomunikasi telepon dan telekomunikasi data, dan pesawat udara.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5. Analisis dari Perspektif Pertanian

Berdasarkan wawancara kepada seorang petani beras adan atas nama FG bahwa dalam dua tahun terakhir sejak tahun 2017-2018 terjadi peningkatan produksi beras adan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah bersama petani. Upaya ekstensifikasi dilakukan dengan percetakan lahan sawah baru dengan dukungan dari program Dana Desa di setiap desa sehingga menurut FG (Camat Krayan Timur) terjadi peningkatan luas lahan pertanian di Krayan Timur sebanyak 40 persen dari luas lahan sebelumnya. Upaya intensifikasi lahan pertanian dilakukan dengan menjalankan program tanam *jajar legowo* yang diberi istilah lokal dengan *tibu siri.* Bagi petani yang menjalankan program tersebut terjadi lonjakan hasil panen menjadi 40 sampai 80 persen dari hasil pada tahun sebelumnya di lahan yang sama.

Upaya yang dilakukan tersebut sudah sangat efektif namun masih dalam skala yang sangat kecil dan terbatas. Potensi ekstensifikasi pada lahan tidur di Krayan masih sangat luas dan upaya penyebarluasan praktek *tibu siri* juga perlu dimassalkan sebagai upaya meningkatkan hasil pertanian beras adan masyarakat. Hal senada disampaikan oleh YS (Camat Krayan Barat) bahwa meskipun hasil panen masyarakat meningkat, tetapi jumlah tersebut tetap belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan rumah tangga petani sepanjang tahun karena habis terjual kepada para

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pengumpul yang berasal dari Malaysia sekalipun dengan harga yang murah.

Seperti disampaikan oleh Adisasmita, R, (2008:37) tentang teori pertumbuhan wilayah dari dalam, bahwa pertumbuhan dari dalam dimaksudkan sebagai telaahan atau wacana yang mengamati proses berlangsungnya pertumbuhan pembangunan dalam suatu wilayah ditinjau dari segi hubungan struktural (keterkaitan antar sektor) maupun dari hubungan fungsional (interaksi antar sub sektor dalam suatu wilayah). Wilayah-wilayah tersebut diartikan sebagai sub system (regional) dari suatu sistem yang lebih besar (nasional), sehingga tugas yang pertama dilakukan adalah melihat proses terjadinya konsentrasi kegiatan-kegiatan utama yang berkembang dan mendorong munculnya pusat-pusat sub sistem wilayah.

Pada wilayah yang mempunyai tingkat pembangunan yang masih relatif rendah dan kaitan secara langsung dengan ketersediaannya surplus hasil pertanian, terdapat dua spesialisasi fungsional yaitu fungsi transportasi dan fungsi niaga (*transportation and commercial functions*) yang memegang peran utama dalam melayani pemasaran. Tempat-tempat pasar di mana surplus hasil pertanian dipertukarkan pada umumnya terletak pada interaksi (pertemuan) rute transportasi (alamiah) yang juga sebagai tempat pertukaran informasi.

Oleh karena itu sebagai strategi pengembangan wilayah perbatasan diperlukan percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Terpadu dengan kawasan perdagangan untuk memfasilitasi perdagangan ekspor komoditas beras adan agar dapat diperdagangkan sebagai komoditas premium organik di pasar dunia.

6. Analisis dari Perspektif Tata Ruang

Dari wawancara peneliti dengan Bapak ER (Bappeda Nunukan) bahwa Pola Ruang wilayah Krayan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan termasuk dalam Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

Termasuk dalam kategori hutan lindung tersebut adalah kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya yaitu Taman Nasional Kayan Mentarang seluas 303.637 hektar meliputi Krayan, Krayan Selatan dan Lumbis Ogong. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan berupa kampung adat dan situs unggulan berskala kabupaten meliputi rumah adat Tanjung Karya, Tang Laan, Pa Upan, Terang Baru, Binuang, dan situs Batu Sicien di Krayan Tengah.

Sedangkan dalam Kawasan Budidaya terdapat beberapa kawasan peruntukan dengan komoditas unggulan berupa kawasan peruntukan Perkebunan di Krayan dan Krayan Selatan dengan komoditas unggulan, vanili, karet, kopi dan tebu. Kawasan Peruntukan Peternakan dengan komoditas unggulan kerbau, ayam dan itik di Krayan dan Krayan Selatan. Kawasan Peruntukan Pertambangan dengan komoditas mineral logam berupa emas, bauksit, besi dan nikel di Krayan dan Krayan Selatan. Kawasan Peruntukan Pertambangan dengan komoditas mineral bukan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

logam berupa batu gunung, pasir, sirtu, batu gamping, pasir kuarsa, dan batu bara muda di Krayan dan Krayan Selatan. Kawasan Peruntukan Pariwisata Budaya di Long Layu, Long Umung dan Long Midang. Sedangkan Pariwisata Alam berupa kawasan ekowisata Taman Nasional Kayan Mentarang di Krayan dan Krayan Selatan. Kawasan Peruntukan Permukiman berupa kawasan permukiman pedesaan tersebar di Krayan dan Krayan Selatan. Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan yang terdiri dari kawasan strategis hankam dengan radius 5 (lima) km sepanjang perbatasan darat berada di Krayan dan Krayan Selatan. Sedangkan kawasan pemeriksaan dan pelayanan pertahanan keamanan yang terdiri dari Pos Gabungan TNI dan Pos Pengamanan Perbatasan berada di Long Midang, Long Layu dan Pa Pani (Perda RTRW Kabupaten Nunukan, 2013).

Dalam RTRW Provinsi Kalimantan Utara, wilayah perbatasan Krayan merupakan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Long Midang. Kawasan perbatasan dengan kegiatan utama ekonomi berada di Long Bawan, Long Layu, Long Midang dan Pa Rupai Kecamatan Krayan berupa *Krayan Border Trade Center* (KBTC); dan Padat Karya Kecamatan Krayan Barat berupa *Krayan Border Shop* (KBS), Pa Tera Kecamatan Krayan Selatan berupa kawasan *Technopark* Pertanian Organik.

Hal senada juga dikatakan oleh E (Kabag Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan) bahwa berdasarkan Perpres 31 Tahun 2015 Krayan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ditetapkan sebagai kawasan perbatasan darat dengan memiliki beberapa kawasan di dalamnya sebagai Zona Lindung 1 (L1) karena memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan tujuan mencegah erosi, menjaga fungsi hidrologis tanah dan memberikan ruang yang cukup untuk peresapan air hujan. Khusus Kecamatan Krayan sebagai Zona Budidaya 1 (B1) karena memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang, kualitas prasarana dan sarana sosial dengan tingkat pelayanan tinggi, kualitas prasarana dan sarana di bidang pertahanan dan keamanan negara dengan tingkat pelayanan tinggi, serta bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi baik vertikal maupun horizontal.

Selanjutnya sebagai Zona Budidaya 2 (B2) karena merupakan zona permukiman perdesaan dengan karakteristik memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang, kualitas prasarana dan sarana sosial dengan tingkat pelayanan sedang, kualitas prasarana dan sarana di bidang pertahanan dan keamanan negara dengan tingkat pelayanan sedang, dan bangunan gedung dengan intensitas sedang baik vertikal maupun horizontal. Sebagai Zona Budidaya 3 (B3) karena merupakan zona pertanian dengan karakteristik sebagai Kawasan Budi Daya yang dikembangkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara, memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah serta prasarana dan sarana pertanian. Sebagai Zona Budidaya 3 (B3) dengan kawasan peruntukan pertanian hortikultura

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ditetapkan Krayan dan Krayan Selatan. Sebagai Zona Budidaya 3 (B3) dengan kawasan peruntukan perkebunan ditetapkan di Kecamatan Krayan.

Berkaitan dengan ditetapkannya Krayan sebagai Kawasan Lindung dengan Taman Nasionalnya Bapak RL (Kepala Adat Besar Krayan Darat) dan Bapak IS (Kepala Adat Besar Krayan Barat) menjelaskan bahwa hal tersebut sampai saat ini masih menjadi polemik di masyarakat karena belum jelasnya batas-batas definitif antara Taman Nasional dengan hak ulayat dan perorangan masyarakat adat. Masih ada keragu-raguan masyarakat adat menerima pemetaan tata batas sementara untuk penataan batas definitif tersebut karena masih ada pro dan kontra di masyarakat tentang penolakan dan dukungan terhadap status Taman Nasional di Krayan.

Menurut Owens dan Shaw, (1977:45) dalam Soetomo, (2013:261) bahwa pada dasarnya merencanakan dan mengendalikan tata ruang menggunakan dua prinsip, pertama mengenali dan merumuskan berbagai fungsi yang harus dilaksanakan pada tingkat regional dan lokal, kedua menentukan kerangka kebijakan nasional dimana bermacam-macam masalah pembangunan akan dipecahkan pada tingkat atau hierarki yang sesuai pada tingkat regional, nasional atau lokal. Oleh karena itu, ke depan pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun *road map* penataan ruang wilayah yang efektif dan operasional, dengan mensinkronisasikan dan mensinergiskan peran dan fungsi antar lembaga tekait.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara, merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam menyusun dan mengatur tata ruang wilayah perbatasan, namun upaya tersebut belum sepenuhnya dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah atau pun dokumen perencanaan spesifik seperti *master plan* pembangunan kawasan perbatasan Krayan sebagai Kawasan Strategis Nasional oleh pemerintah Kabupaten Nunukan. Karenanya dalam rangka pengembangan wilayah, pemerintah daerah Kabupaten Nunukan, diharapkan dapat segera membuat Peraturan Daerah (Perda) dan atau dokumen perencanaan berupa *master plan* sebagai penjabaran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 dengan melakukan penataan ruang yang efektif dan operasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antara pusat dan daerah dalam rangka mengembangkan wilayah perbatasan Krayan.

7. Analisis dari perspektif Fungsi Strategis Wilayah Krayan

Menurut hasil wawancara dengan Bapak S (Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan) fungsi strategis wilayah Krayan terletak pada letak geografisnya di wilayah Utara Kalimantan, terutama dalam letaknya yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, yaitu Long Midang dengan Ba Kelalan (distrik Lawas) dan negara bagian Sabah, yaitu Pa Pani dengan Long Pasia di Sabah. Selain itu Krayan juga mudah dijangkau dari

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Brunei Darussalam melalui jalur Sarawak dan akan lebih efektif lagi apabila telah terhubung dengan jalan perbatasan Long Bawan – Pa Betung – Pa Pani – Batas Negara melalui pintu imigrasi Long Pasia, Sabah Malaysia. Sedangkan di sisi Indonesia tepatnya di Kecamatan Krayan Tengah, berbatasan dengan Kabupaten Malinau sebagai pintu distribusi logistik dari dalam negeri. Dengan posisi demikian Krayan memiliki fungsi strategis sebagai poros segi tiga emas di ujung darat Kalimantan Utara dalam konteks pengembangan ekonomi dan pembangunan kawasan perbatasan antar tiga negara.

Klasifikasi Friedmann (1964) dalam Adisasmita (2008) kemudian mengembangkan klasifikasi daerah inti dan daerah-daerah pinggiran menjadi daerah metropolitan (*metropolitan region*), poros pembangunan (*development axes*), daerah perbatasan (*frontier region*), dan daerah tertekan (*depressed region*). Secara esensial hubungan antara daerah metropolitan dengan daerah-daerah perbatasan tidak berbeda dengan hubungan antara daerah inti dengan daerah-daerah pinggiran. Poros pembangunan merupakan perluasan dari daerah metropolitan dan sebagai bentuk embrio untuk berkembang menjadi megapolis. Wilayah perbatasan termasuk dalam kategori daerah pinggiran, dan di dalamnya terdapat pusat-pusat kecil yang mempunyai potensi berkembang menjadi pusat-pusat yang lebih besar pada masa depan Adisasmita, R, (2008:120). Oleh karena itu pemerintah diharapkan memiliki konsep perencanaan kerjasama trilateral antara Indonesia – Malaysia dan Brunei Darussalam dalam pengembangan kawasan perbatasan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dari berbagai analisis perspektif di atas dapat ditarik ringkasan analisis sebagai berikut :

a. Geografis

Bahwa dengan letak geografisnya yang berbatasan dengan Sarawak dan Malaysia, maka Krayan harus dibangun dengan pendekatan fungsi perbatasan yang disampaikan oleh Van Well (2006) dalam Zamzami (2016) sebagai simbol identitas, lambang identitas Indonesia agar kedaulatan NKRI di perbatasan benar-benar terwujud. Oleh karena itu diperlukan strategi pembangunan kawasan perbatasan Krayan dengan mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang tersebar di beberapa wilayah Krayan yang berbasis pertanian seperti Pembangunan Technopark Pertanian Organik, menuntaskan pembangunan Toko Indonesia, mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, listrik, air bersih, bandara dan telekomunikasi, sarana pendidikan, kesehatan, pembangunan PLBN Long Midang, perencanaan pemanfaatan tata ruang daerah perbatasan, dan menanamkan nilai-nilai nasionalisme di masyarakat.

b. Pemerintahan

Dalam rangka mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan maka perlu dipertimbangkan untuk membentuk DOB Kabupaten Krayan untuk memperkuat nilai strategis Krayan sebagai *barrier* dan sebagai

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

citra kedaulatan dan daya saing bangsa Indonesia di mata internasional.

c. Penduduk dan Ketenagakerjaan

Pada hakikatnya pengembangan wilayah yang bersifat menyeluruh merupakan pembangunan yang menyentuh aspek fisik dan aspek sumber daya manusianya. Oleh karena itu, dukungan jumlah penduduk dalam pengembangan wilayah juga sangat diperlukan. Sehingga dalam kerangka itu maka jumlah penduduk Krayan yang sedikit dengan tingkat pertumbuhan yang rendah perlu ditingkatkan melalui program pembinaan dan penyuluhan Keluarga Berencana.

d. Infrastruktur dan Komunikasi

Krayan sebagai wilayah yang terpencil hanya dapat dibangun apabila tersedia infrastruktur jalan yang memadai yang menghubungkan desa dengan desa melalui percepatan pembangunan dan peningkatan Jalan Lingkar Krayan *(Krayan Ring Road)*, percepatan pembangunan ruas jalan ke Kabupaten Malinau, peningkatan kualitas bandara Yuvai Semaring agar dapat didarati ATR 72 dan bandara-bandara perintis lainnya perlu ditingkatkan dari landasan rumput menjadi aspal. Sedangkan ruas jalan perbatasan perlu dituntaskan pembangunannya sampai kondisi aspal.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Selain itu perlu juga segera dijamin ketersediaan infrastruktur kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit, sarana pendidikan, listrik dan telekomunikasi.

e. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang menjadi unggulan wilayah perbatasan Krayan karena sangat dikenal dengan produksi Beras Adan yang organik dan beraroma wangi serta enak. Namun demikian dukungan pengembangan sektor ini masih sangat minim dimana luas areal, irigasi, sistem budidaya dan pengolahan pasca panennya serta pemasarannya masih dilakukan secara sederhana dan tradisional oleh petani setempat. Oleh karena itu perlu dukungan pengembangan oleh Pemerintah baik perluasan lahan, penyediaan jaringan irigasi yang memadai, pendampingan dan pelatihan sistem budidaya yang baik, sistem pengolahan pasca panen yang berstandar dan pembentukan jaringan pasar yang terjamin sangat dibutuhkan dalam rangka pengembangan wilayah perbatasan Krayan.

f. Tata Ruang

Ruang wilayah Krayan sebagai wilayah perbatasan negara telah diatur dalam dokumen RTRW Kabupaten Nunukan dan Provinsi Kalimantan Utara serta RTRW Kawasan Perbatasan Negara. Namun demikian tetap dibutuhkan suatu perencanaan ruang yang spesifik di kawasan perbatasan di Krayan berupa

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

master plan dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang penataan ruang secara efektif dan operasional untuk pengembangan wilayah perbatasan Krayan.

g. Fungsi Strategis Wilayah Krayan

Dengan posisi geopolitik yang dimiliki Krayan pada poros segitiga emas *(gold triangle)* Sarawak - Sabah – Brunei Darussalam, maka Krayan memiliki potensi besar sebagai kawasan perbatasan darat untuk berkembang pesat di wilayah Kalimantan Utara. Sehingga dalam pertimbangan itu pemerintah diharapkan memiliki kerjasama trilateral antara Indonesia – Malaysia – dan Brunei Darussalam dalam pengembangan kawasan perbatasan secara bersama-sama di perbatasan Krayan.

Dalam rangka menentukan strategi pengembangan wilayah perbatasan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, maka melalui beberapa analisis perspektif di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keunggulan kompetitif *(compatitive advantage)* sebagaimana Hatten dan Hatten (1988) dalam Salusu (1996:7), yang dimiliki oleh Krayan saat ini adalah sektor pertanian dengan komoditas Beras Adan. Oleh karena itu pengembangan sektor pertanian harus dijadikan strategi pengembangan wilayah perbatasan Krayan. Hal tersebut harus didukung dengan percepatan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama yaitu infrastruktur pertanian, pekerjaan umum, kebandarudaraan, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, listrik, pengairan dan infrastruktur pemukiman.

Secara politik pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memberikan otonomi khusus di wilayah perbatasan Krayan demi tegaknya kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat (Humphrey Wangke, 2017:79).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada perspektif geografis, pemerintahan, penduduk dan ketenagakerjaan, infrastruktur dan transportasi, pertanian, tata ruang dan analisis fungsi strategis wilayah Krayan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keunggulan kompetitif *(compatitive advantage)* sebagaimana Hatten dan Hatten (1988) dalam Salusu (1996:7), yang dimiliki oleh Krayan saat ini adalah sektor pertanian dengan komoditas Beras Adan. Oleh karena itu pengembangan sektor pertanian harus dijadikan strategi pengembangan wilayah perbatasan Krayan. Hal tersebut harus didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama yaitu infrastruktur pertanian, pekerjaan umum, kebandarudaraan, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, listrik, pengairan dan infrastruktur pemukiman. Bersamaan dengan itu secara politik pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memberikan otonomi khusus di wilayah perbatasan Krayan demi tegaknya kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

1. Teoritis

Untuk menambah khasanah pengembangan ilmu administrasi publik tentang pengembangan kawasan perbatasan disarankan agar dilakukan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

penelitian lanjut secara spesifik mengenai beberapa variabel utama yaitu kawasan perbatasan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Praktis

Diperlukan strategi pengembangan kawasan perbatasan dengan mendorong pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah di perbatasan Krayan melalui :

a. Pembangunan *Technopark* Pertanian Organik sebagai pusat penelitian dan pengembangan produk pertanian organik Beras Adan dan komoditas lokal lainnya.
b. Membuka keterisolasian kawasan dengan membangun infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih dan sarana transportasi dan komunikasi,
c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan membangun sarana pendidikan, kesehatan, pertanian dan ekonomi,
d. Meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor dengan mempercepat pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Pos Pamtas di Long Midang,
e. Membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Krayan,
f. Dalam rangka pengembangan wilayah, pemerintah daerah Kabupaten Nunukan, diharapkan dapat menyusun Peraturan Daerah (Perda) dan atau dokumen perencanaan berupa *master plan* sebagai penjabaran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifin, Saru (2015). *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara* (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.

Adhayanto, Oksep, dkk. *Kajian Akademik Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur Provinsi Kepulauan Riau.* Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Eko, Sutoro (2004). *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat.* Yogyakarta: APMD Press.

Eko Prasojo, dkk (2015). *Pemerintahan Daerah.* Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Indonesia.

Hidayat, Syarif. (2008). *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State-Society Relation.* Jurnal POELITIK Vol.1 No.1 2008.

Juanda Nawawi (2012). *Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik.* Makassar: Penerbit Menara Intan.

Hamdi, Muchlis (2014). *Metodologi Penelitian Administrasi,* Edisi 2. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Humphrey Wangke (2018). Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah.* Jakarta: Penerbit Erlangga.

Lubis, dkk (2016). *Kajian Akademik Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Krayan Sebagai Salah Satu Kawasan Strategis Nasional di Daerah Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia Dengan Sabah Dan Serawak, Malaysia.* Jakarta: Universitas Indonesia.

Mita Noveria, Firman Noor. 2017. *Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan: Perspektif Multidimensi.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Moleong, Lexy. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

M.D. Mahfud, Moh. (2009). *Konstitusi Hukum dalam Kontroversi Isu.* Jakarta: Rajawali Pers.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Salusu, J (1996). Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprovit. Jakarta : Grasindo.

Singarimbun, Masri, dkk. (1989). *Metode Penelitian Survai.* Jakarta: LP3ES.

S.H. Sarundajang (2001). *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Starke, J.G. (2007). *Pengantar Hukum Internasional* (Edisi kesepuluh, Buku I). Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Saile, S. (2009). *Pemekaran Wilayah Sebagai Buah Demokrasi di Indonesia.*

Tang Abdullah, Muh (2011). *Menelaah Kebijakan Pemekaran Daerah Di Indonesia.* Spirit Publik Vol. 7, No. 1, April 2011 Hal. 15-28

Tim EDOHP (2011). *Laporan Hasil Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran 2011.* Jakarta: Dirjen Otonomi Daerah.

Wuryandari, Ganewati (2009). *Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste.* Yogyakarta-LIPI: Pustaka Pelajar.

Zamzami (2016). *Analisis Pengembangan Wilayah Perbatasan RI - Malaysia di Kabupaten Nunukan.* Universitas Terbuka.

Artikel

Anonim (2010). *10 Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli, dan Dasar Hukum, Asas, Prinsip, Tujuan Otonomi Daerah Secara Lengkap.* Diambil pada tanggal 10 Juni 2017 dari http://www.seputarilmu.com/2016/01/10-pengertian-otonomi-daerah-menurut.html

Anonim (2015). *Pengertian Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.* Diambil pada tanggal 10 Juni 2017 dari http://pusathukum.blogspot.co.id/2015/12 /otonomi-daerah-dan-daerah-otonom.html

Anonim (2016). *Mendagri Tak Setujui 5 Usulan DOB di Kaltara,* dalam Lintas Benuanta, 6 Oktober.

Antara News (2016). *http://kalsel.antaranews.com/berita/34658/krayan-diusulkan-menjadi-destenasi-wisata-kaltara*

Balai Taman Nasional Kayan Mentarang. 2014. *Zonasi Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang.* Tarakan, Balai Taman Nasional Kayan Mentarang.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Herawati, N.R. *Pemekaran Daerah di Indonesia.* Diambil pada tanggal 19 Februari 2017 dari world wide web pada http://www.ejournal.undip.ac.id/index.php /politika/article/download/

Kelompok Kerja Nasional *Heart of Borneo*. *Heart of Borneo Indonesia.* Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Monoarfa, Agussalim, Moh (2016). *Good Governance Dalam Tinjauan Otonomi Daerah.* Diambil tanggal 10 Juni 2017, dari situs world wide web:http://repository.ung.ac.id/get/simlit_res/1/303/Good-Governance-Dalam-Tinjauan-Otonomi-Daerah.pdf, https://www.google.co.id/

Radar Kaltara (2017). *DOB Krayan, Solusi Keterisolasian.* Edisi 08 Oktober 2017.

Dokumen

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 Tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033.* Nunukan, Bagian Hukum Setkab Nunukan.

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 Tentang *Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Kalimantan.* Jakarta, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 600 / /DPU/VII/2016 Tanggal 03 Juni 2016 Tentang *Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten.*

Dewan Presidium DOB Kabupaten Krayan, 2016. *Usulan Aspirasi Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Krayan,* Sekretariat Dewan Presidium DOB Kabupaten Krayan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan. 2016. *Statistik Daerah Kecamatan Krayan 2016.* Nunukan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan.

Lidya Sitohang, 2016. *Bahan Paparan Cross-Border Interaction : In the context of Kalimantan Border Region Development.* Kerjasama DIKTI-ScientificProgram Indonesia-Netherlands dengan Institute for Management Research, Radboud University.

Dewan Presidium DOB Kabupaten Krayan, 2017. *Bahan Paparan Presidium DOB Krayan.* Nunukan, Sekretariat Dewan Presidium DOB Kabupaten Krayan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dewan Presidium DOB Kabupaten Krayan, 2017. *Pointer Laporan Presidium Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara di wilayah Cakupan DOB Kabupaten Krayan.* Nunukan, Sekretariat Dewan Presidium DOB Kabupaten Krayan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 1 :

Tabel 4.1.

Daftar Desa Se-Krayan

No.	Kecamatan	D e s a
1.	Krayan	1. Pa Padi 2. Cinglat 3. Liang Butan 4. Pa Rupai 5. Ba Sikor 6. Pa Nado 7. Buduk Kinangan 8. Long Berayang 9. Pa Api 10. Pa Sire 11. Wa Yanud 12. Long Nawang 13. Long Katung 14. Long Bawan 15. Long Matung 16. Long Rupan 17. Wa Laya 18. Liang Tuer 19. Buduk Tumu 20. Liang Biadung 21. Pa Matung 22. Pa Terutun 23. Pa Putuk
2.	Krayan Selatan	1. Long Pasia 2. Liang Lunuk 3. Pa Ibang 4. Pa Amai 5. Pa Kaber 6. Pa Tera 7. Pa Sing 8. Pa Dalan 9. Long Birar 10. Pa Upan 11. Long Budung 12. Long Pupung 13. Pa Urang
3.	Krayan Tengah	1. Tang Paye 2. Long Rungan 3. Long Kelupan 4. Long Padi 5. Tang Badui

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

		6. Binuang 7. Long Mutan 8. Pa Milau 9. Ba Liku 10. Long Rian 11. Pa Yalau
4.	Krayan Timur	1. Pa Betung 2. Long Sepayang 3. Pa Lidung 4. Pa Raye 5. Bungayan 6. Pa Pawan 7. Wa Yagung 8. Pa Melade 9. Pa Kebuan 10. Kampung Baru 11. Long Tenem 12. Pa Umung 13. Pa Rangeb 14. Long Nuat 15. Pa Pala 16. Long Umung 17. Sinar Baru
5.	Krayan Barat	1. Pa Mulak 2. Pa Payak 3. Long Puak 4. Pa Pirit 5. Buduk Kubul 6. Liang Aliq 7. Long Kabid 8. Sembudud 9. Pa Inan 10. Liang Turan 11. Lembudud 12. Liang Bua 13. Long Tugul 14. Lepatar 15. Pa Butal 16. Pa Mering 17. Pa Delung 18. Pa Pani 19. Pa Urud 20. Pa Lutut 21. Pa Kemut 22. Ma Libu 23. Pa Kidang 24. Lembada

Sumber: Kode Kecamatan Kab. Nunukan, Kemendagri, 2017.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 2:

Tabel 4.3

Jumlah Organisasi dan Anggotanya di Krayan

No	Jenis Organisasi	Jumlah Organisasi	Jumlah Anggota
1	Adat Besar	5	129
2	Dewan Adat Besar	5	5
3	Adat Desa	89	445
4	Dewan Adat Desa	89	89
5	Organisasi Perempuan	89	2065
6	Organisasi Pemuda	74	959
7	Organisasi Profesi	0	0
8	Organisasi Bapak	29	3652
9	LKMD	89	445

Sumber: Data Monografi Kecamatan se-Krayan 2016

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 3 :

Tabel 4.7
Daftar Ruas dan Panjang Jalan Kabupaten di Wilayah Krayan

No	Ruas Jalan	Jenis Perkerasan						Total Panjang Ruas (m)
		Agregat		Aspal		Tanah		
		Panjang	Kondisi	Panjang	Kondisi	Panjang	Kondisi	
1	Jl. Pa'Padi - Long Padi	-	-	-	-	15.000	Rusak	15.000
2	Jl. Long Bawan Menuju Rumah Sakit Pratama Krayan	-	-	-	-	5.000	Rusak	5.000
3	Jl. Long Bawan - Terang Baru - Pa'Padi	2.000	Rusak	-	-	8.000	Rusak	10.000
4	JL Long Umung - Pa'Reyeh	-	-	-	-	7.000	Rusak	7.000
5	Jl. Long Umung - Wa'Yagung	-	-	-	-	10.000	Rusak	10.000
6	Jl. Long Midang - Kantor Camat Krayan Induk	2.000	Rusak	1.000	Rusak	5.000	Rusak	8.000
7	Jl. Long Midang - Batas Negara	2.000	Rusak	-	-	-	-	2.000
8	Dalam Kota Kecamatan Krayan/Long Bawan	-	-	5.000	Rusak	-	-	5.000
9	Dalam Kota Kecamatan Krayan Selatan/Long Layu	-	-	-	-	5.000	Rusak	5.000
10	Long Layu - Pa'Upan	-	-	-	-	5.000	Rusak	5.000
11	Pa'Upan - Long Rungan	-	-	-	-	11.000	Rusak	11.000
12	Long Rungan - Long Padi	-	-	-	-	12.000	Rusak	12.000
13	Long Padi - Binuang	-	-	-	-	7.000	Rusak	7.000
14	Long Layu - Batas Negara	-	-	-	-	5.000	Rusak	5.000
	TOTAL	**6.000**		**6.000**		**95.000**		**107.000**

Sumber : Kantor Camat Krayan, 2018.

PEDOMAN WAWANCARA
(INTERVIEW GUIDE)

A. Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di wilayah Krayan Kabupaten Nunukan

1. Bagaimana kondisi Geografis wilayah perbatasan Krayan :
   a. Bagaimana gambaran letak perbatasan Krayan secara geografis dari Ibu Kota Negara, Provinsi, Kabupaten dan regional Indonesia – Malaysia ?
   b. Apakah ada data-data yang terkait dengan hal itu ?

2. Bagaimana kebijakan pemerintah pusat terkait pembangunan wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan :
   a. Apakah ada dokumen perencanaan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat ?
   b. Berapa besar kemungkinan anggaran pengembangan wilayah perbatasan yang akan dikeluarkan ?
   c. Kapan akan direalisasikan pembangunan di wilayah perbatasan ?

3. Apakah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten sudah menjabarkan kebijakan terkait pengembangan dan pembangunan wilayah perbatasan :
   a. Dalam bentuk apa penjabaran kebijakan pusat yang sudah dilaksanakan?
   b. Apakah sudah ada Peraturan Daerah Provinsi terkait penjabaran kebijakan pusat ?
   c. Bagaimana sinkronisasi dan sinergitas koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dengan BNPP, BPPD Provinsi dan Bagian Perbatasan Kabupaten ?
   d. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pengembangan dan pembangunan wilayah perbatasan ?

4. Bagaimana kondisi pemerintahan di wilayah perbatasan Krayan :
   a. Bagaimana kondisi pemerintahan di tingkat Kecamatan dan desa ?
   b. Apakah ada data-data yang terkait dengan hal itu ?

5. Bagaimana kondisi kependudukan dan ketenagakerjaan di wilayah perbatasan Krayan (Krayan / Krasel / Krateng / Kratim / Krabar) :
   a. Berapa jumlah penduduk daerah perbatasan Krayan ?
   b. Bagaimana gambaran suku yang menjadi penduduk Krayan ?
   c. Apa jenis mata pencaharian utama masyarakat di perbatasan ?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

6. Bagaimana gambaran Infrastruktur di wilayah Krayan (meliputi 5 Kecamatan di Krayan) :
   a. Apa saja jenis infrastruktur yang telah dibangun pemerintah di wilayah Krayan dalam kurun waktu 2010 – 2017 ?
   b. Dimana lokasi pembangunan infrastruktur tersebut ?
   c. Berapa anggaran yang pernah dikucurkan dalam kurun waktu 2010 - 2017 untuk pembangunan infrastruktur di Krayan berdasarkan sumbernya (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN)?
   d. Apa jenis program dan kegiatan beserta anggaran yang direncanakan dalam kurun waktu 2016 – 2021 untuk pembangunan infrastruktur di Krayan berdasarkan sumbernya (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN)?
   e. Berapa panjang jalan di Krayan berdasarkan jenisnya ?
   f. Bagaimana kondisi jalan dan jembatan di Krayan ?
   g. Bagaimana perbedaan kondisi infrastruktur dengan negara tetangga Malaysia ?
   h. Berapa jumlah kendaraan di Krayan berdasarkan jenis dan sumber pengadaannya ?
   i. Apa saja jenis transportasi darat dan udara (subsidi dan reguler) masuk dan keluar ke wilayah Krayan ?
   j. Berapa biayanya ?
   k. Apakah ada data-data terkait kondisi transportasi di SKPD terkait ?

7. Bagaimana gambaran perekonomian di wilayah perbatasan Krayan :
   a. Bagaimana gambaran perekonomian di kecamatan dan di desa-desa di wilayah perbatasan ?
   b. Bagaimana persediaan kebutuhan sembilan bahan pokok ?
   c. Dari mana kebutuhan sembilan bahan pokok didapatkan ?
   d. Dengan cara bagaimana sembilan bahan pokok didapatkan ?
   e. Bagaimana perbedaan harga sembilan bahan pokok antara Indonesia-Malaysia ?
   f. Sejauhmana ketergantungan kebutuhan pokok (sembako) masyarakat dengan Malaysia ?

8. Bagaimana kondisi Tata Ruang wilayah perbatasan Krayan :
   a. Apakah wilayah perbatasan Krayan sudah memiliki Tata Ruang ?
   b. Apa hal strategis yang dimiliki perbatasan Krayan dalam Tata Ruang ?

9. Bagaimana kondisi sarana telekomunikasi di daerah perbatasan :
   a) Apakah saluran telekomunikasi (BTS) sudah sampai di Kecamatan dan Desa ?
   b) Apakah telepon seluler sudah aktif sampai ke Desa-desa ?
   c) Apakah jaringan data sudah sampai di kecamatan dan desa ?
   d) Apakah siaran Televisi Indonesia sudah diterima sampai ke desa-desa

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10. Bagaimana kondisi pelayanan dan sarana kesehatan di wilayah perbatasan Krayan :
    a. Apa saja tempat pelayanan kesehatan yang tersedia di daerah perbatasan Krayan ?
    b. Apakah jumlah tenaga medis (dokter, bidan dan perawat) sudah memadai?
    c. Apakah masyarakat perbatasan Krayan juga menerima KIS-BPJS ?
    d. Jumlah masyarakat yang menerima KIS-BPJS?
    e. Bagaimana mengatasi masalah kesehatan bila ada pasien yang harus dievakuasi / dirujuk ?
    f. Apakah ada data rujukan keluar dalam 8 tahun terakhir sejak 2010?

11. Bagaimana kondisi sarana pendidikan di wilayah perbatasan Krayan (Kecamatan Krayan / Krasel / Krateng / Kratim / Krabar)?
    a. Apakah SD, SMP dan SMA sudah tersedia dengan memadai di perbatasan Krayan ?
    b. Berapa jumlah sekolah di perbatasan Krayan berdasarkan jenjangnya?
    c. Apakah tenaga pengajar di perbatasan Krayan sudah memadai ?
    d. Berapa jumlah guru berdasarkan jenjang penyelenggaraan?
    e. Apakah kualifikasi pendidikan tenaga pengajar di daerah perbatasan Krayan sudah memadai ?
    f. Apakah ada data tingkat pendidikan guru di setiap jenjang sekolah?
    g. Apakah ada data murid di setiap jenjang sekolah ?
    h. Apakah ada anggaran yang dikucurkan dalam kurun waktu 2010 - 2017 untuk pembangunan infrastruktur / fisik pendidikan dan non fisik di perbatasan Krayan (BOSDA, BOS, Tunjangan Sertifikasi Guru, Tunjangan Khusus Daerah Sangat Tertinggal, dll berdasarkan sumbernya (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN)?

B. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pengembangan wilayah perbatasan Krayan ?
    a. Faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung Pengembangan Wilayah Perbatasan Krayan Kabupaten Nunukan?
    b. Upaya apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dan meningkatkan faktor pendukung pengembangan wilayah perbatasan di Krayan?

C. Hal apa yang sebaiknya dilakukan sebagai suatu upaya dalam merumuskan strategi pengembangan wilayah perbatasan di Krayan :
    a. Oleh Pemerintah ?
    b. Oleh masyarakat ?

Peneliti

Helmi Pudaaslikar, S.IP

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

MATRIKS HASIL WAWANCARA

No.	Perspektif	Informan	Pertanyaan	Jawaban
1	2	3	4	5
1.	Ekonomi	STP (Kepala Biro Pengelola Perbatasan Daerah, Provinsi Kalimantan Utara sekaligus Ketua Lembaga Percepatan, Perluasan Pembangunan Perbatasan Krayan)	Dalam rangka peningkatan dan pengembangan perekonomian di perbatasan Kalimantan Utara di wilayah Krayan, hal apa yang menjadi kebijakan dan pembangunan kawasan perbatasan di Krayan ?	Arah Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara 2017 – 2021 merupakan arah kebijakan yang diharapkan mampu menjadi jalan keluar bagi permasalahan dan isu strategis yang ada di kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara, yang disusun sesuai dengan sasaran perencanaan jangka panjang pengelolaan kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara 2016 – 2036 sebagai berikut : a. Pembangunan Infrastruktur yang menjadi dasar bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas kehidupan bermasyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Meningkatkan kehidupan dan kemandirian masyarakat dari sisi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. c. Menetapkan, pemeliharaan dan penegakan batas wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Utara. d. Peningkatan tata kelola lingkungan yang berbasis kearifan lokal.
			Berdasarkan pengamatan atau pengalaman Bapak mengenai kondisi	Faktor penghambat Pengembangan Wilayah Perbatasan Krayan Kabupaten Nunukan,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

			perbatasan Indonesia di Krayan saat ini, faktor-faktor apa yang menghambat Pengembangan Wilayah Perbatasan Krayan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara ?	Provinsi Kalimantan Utara antara lain : a. Belum terkoordinasinya sinergitas antara instansi yang menangani perbatasan yang terwujud dari masih lemahnya koordinasi antara lembaga sehingga mengakibatkan terjadinya inefektifitas program aksi dan eksekusi penganggarannya. b. Keterisolasian kawasan perbatasan, karena keterbatasan infrastruktur dasar wilayah, yaitu transportasi, energi (listrik dan BBM), komunikasi dan informasi, menyebabkan lambannya pertumbuhan ekonomi dan minimnya pelayanan sosial dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan. c. Belum efektifnya pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat – pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan. d. Pengamanan dan pengelolaan batas wilayah yang belum optimal sehingga masih banyak terdapat aktifitas ilegal di wilayah perbatasan e. Pengelolaan perbatasan negara belum terintegrasi antar sektor, sehingga pembangunan perbatasan masih dominan dengan pendekatan persial / sektoral. f. Minimnya akses transportasi dan telekomunikasi membuat masyarakat perbatasan tergantung dengan fasilitas

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

				negara tetangga.
			Menurut Bapak, apa upaya yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat pengembangan wilayah perbatasan di Krayan?	Upaya yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat pengembangan wilayah perbatasan di Krayan antara lain : a. Senantiasa membangun koordinasi yang sinergis antara instansi yang menangani perbatasan sehingga nantinya terjadi efektifitas program aksi dan eksekusi programnya, seperti mengadakan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan baik di tingkat Provinsi maupun Pusat. b. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar berupa jalan, listrik, air bersih dan sarana telekomunikasi dan juga prasarana penunjang transportasi udara, air untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan dan menghapuskan keterisolasian daerah. c. Memadukan pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Simpul Konektivitas, Pintu Gerbang Internasional dan Pos Lintas Batas. Pembangunan PKSN ditetapkan dalam Ordo Pertama yang selanjutnya akan dilanjutkan akan dilanjutkan di wilayah Lokasi Prioritas (LOKPRI) sehingga memberikan *spread effect* (efek

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

				penyebaran) ke wilayah LOKPRI sekitarnya. d. Meningkatkan keamanan dan stabilitas pertahanan di wilayah perbatasan sehingga penanganan aktifitas ilegal dapat ditangani. e. Membangun sistem pengelolaan aktivitas lintas batas negara yang terpadu dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan lintas batas yang aman, nyaman dan rama investasi. f. Meningkatkan upaya –upaya pembangunan kawasan perbatasan negara melalui pemanfaatan potensi kawasan perbatasan dan penyediaan infrastruktur kawasan perbatasan dalam rangka mengatasi keterisolasian wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
			Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mendukung Pengembangan Wilayah Perbatasan Krayan Kabupaten Nunukan?	Faktor-faktor pendukung Pengembangan Wilayah Perbatasan Krayan Kabupaten Nunukan antara lain : a. Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur dasar berupa jalan, listrik, air bersih dan sarana telekomunikasi dan juga prasarana penunjang transportasi udara air untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan dan menghapuskan keterisolasian daerah. b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

				perbatasan berupa peingkatan sumber daya manusia dan aktivitas ekonomi. c. Meningkatkan keamanan dan stabilitas pertahanan di wilayah pebatasan. d. menjaga kualitas lingkungan dan mempertahankan fungsi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. e. Adanya kebijakan pemerintah NAWACITA ke 3 Jokowi f. Kebijakan pembangunan pemprov kaltara prioritas point ke 7 dan point ke 8 serta point ke 11.
			Hal apa yang sebaiknya dilakukan sebagai strategi pengembangan wilayah perbatasan di Krayan? a. Oleh Pemerintah ? b. Oleh masyarakat ?	**a. Oleh Pemerintah :** ✓ Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di Krayan yang berbasis pada pertanian ✓ Membuka keterisolasian kawasan dan membangun infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih dan sarana transportasi dan komunikasi. ✓ Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan membangun sarana pendidikan, kesehatan, pertanian dan ekonomi. ✓ Meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor ✓ Membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Krayan ✓ Mereformasi pelayanan public di

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

				Krayan ✓ Menerapkan kebijakan desentralisasi asimetris untuk kawasan perbatasan (Krayan); ✓ Meningkatkan kualitas pengaturan, pembinaan, pemanfaatan, dan pengawasan rencana tata ruang daerah perbatasan; ✓ Menjaga kawasan perbatasan dengan menyelesaikan batas wilayah, membangun pos lintas batas negara (PLBN) terpadu dan pamtas ✓ Menanamkan nilai – nilai Nasionalis yang tinggi. **b. Oleh masyarakat :** ✓ Mendukung kebijakan pemerintah di Krayan ✓ Memperkuat kelembagaan ekonomi desa melalui koperasi ✓ Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan daerah ✓ Mendukung pembentukan DOB Kabupaten Krayan ✓ Meningkatkan kapasitas melalui pendidikan dan latihan sehingga dapat memanfaatkan potensi lokal secara bijak, berdaya saing dan berwawasan lingkungan ✓ Senantiasa menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

				✓ Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri.
2	Geografi	Camat Krayan Barat	Gambaran geografi wilayah Krayan	- Krayan memiliki luas wilayah 3.592,4 km^2. - Letak geografis Krayan sangat strategis berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah dan Sarawak Malaysia Timur serta sangat dekat dengan Brunei Darussalam. - Suhu udara di kecamatan ini juga relatif rendah dikarenakan sebagian besar wilayahnya berada di ketinggian lebih dari 1000 m.
		TH (Sekda Kab. Nunukan)		- Wilayah Krayan merupakan daerah yang terbentang di sepanjang tapal batas darat dengan Malaysia yang memiliki 5 (lima) pintu masuk *(entry point)* di mana 4 (empat) pintu berbatasan dengan negara bagian Sarawak dan 1 (satu) pintu berbatasan dengan negara bagian Sabah Malaysia. Adapun pintu masuk dimaksud adalah sebagai berikut : a. Long Midang, Kecamatan Krayan : merupakan pintu masuk dari Ba' Kelalan bagian Sarawak Malaysia. b. Lembudud, Kecamatan Krayan Barat : berbatasan dengan Bario, Sarawak (Malaysia). c. Tanjung Karya, Kecamatan Krayan Barat : berbatasan dengan Pa Depur,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

				Sarawak (Malaysia). d. Long Layu, Kecamatan Krayan Selatan : berbatasan dengan Pa' Dallih, Sarawak (Malaysia), dan e. Pa' Pani, Kecamatan Krayan Timur : berbatasan dengan Long Pasia di bagian Sabah (Malaysia). - Dengan kondisi wilayah yang sangat sulit dijangkau dari Indonesia dan letaknya yang sangat dekat dengan Malaysia, menimbulkan ketergantungan sosial ekonomi masyarakat Krayan sangat tinggi terhadap Malaysia.
		LGP (Kepala Adat Besar Krayan Hulu sekaligus sebagai Presiden FORMADAT Indonesia)	Dengan kondisi Geografis yang berada di dataran tinggi, apakah kawasan perbatasan Krayan memiliki potensi yang dapat diunggulkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan?	Potensi sumber daya yang khas di wilayah perbatasan darat Indonesia dan Malaysia yang sama-sama dipunyai kedua sisi masyarakat di perbatasan seperti Beras Adan di sektor pertanian, adat istiadat dan atraksi budaya di sektor kebudayaan, keindahan alam dan ekowisata di sektor pariwisata mendorong adanya inisiatif kerjasama antar masyarakat adat di perbatasan dengan membentuk Forum Masyarakat Dataran Tinggi Borneo (FORMADAT) sebagai wadah perumusan kebijakan dan kerjasama promosi dan pemasaran potensi kawasan yang dimiliki bersama.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3	Pemerintahan	FG (Camat Krayan Timur)	Gambaran pemerintahan wilayah Krayan	Krayan terdiri 5 (lima) Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Krayan Tengah, Kecamatan Krayan Timur dan Kecamatan Krayan Barat.
		TH (Sekda Kab. Nunukan sekaligus Ketua Presidium Pembentukan Kab. Krayan)		Bahwa pemekaran kecamatan di Krayan didorong oleh semangat untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat Krayan yang tersebar di sepanjang wilayah perbatasan serta untuk mendorong percepatan dan perluasan pembangunan perbatasan yang saat ini masih sangat tertinggal dibanding wilayah-wilayah lainnya di Indonesia apalagi jika dibandingkan dengan negara tetangga.
4	Penduduk dan Ketenagakerjaan	a. MK (Camat Krayan Selatan), b. H (Camat Krayan Tengah), c. FG (Camat Krayan Timur), d. YS (Camat Krayan Barat), e. RDF (Sekcam Krayan)	Gambaran penduduk dan ketenagakerjaan di wilayah Krayan	- Pertumbuhan penduduk di Krayan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. - Pertumbuhan angka jumlah penduduk terjadi karena beberapa perpindahan tenaga kerja dan pendatang dari luar Krayan serta hasil pendataan ulang terhadap penduduk Krayan yang tinggal di luar Krayan terutama di Malaysia sejak belasan bahkan puluhan tahun yang lalu tapi belum memiliki status kewarganegaraan Malaysia. - Jumlah penduduk 19.007 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 5.16 jiwa per kilometer persegi. - Penduduk asli daerah Krayan adalah suku Dayak Lundayeh dengan persentase sebanyak 97,5%

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

		NN (Ibu-ibu muda Terang Baru)	Hal apa yang menjadi alasan ibu-ibu menjadi akseptor KB aktif?	- Tidak mau repot mengurus anak, dan - Ingin menikmati keleluasaan di masa muda
5	Infrastruktur	STP (Kabiro Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Utara)	Bagaimana gambaran infrastruktur di wilayah Krayan ?	Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di Krayan masih sangat minim dan memprihatinkan
		MK (Camat Krayan Selatan)		- Kelima kecamatan yang ada terkoneksi oleh ruas jalan lingkar Krayan, tapi kondisinya berupa jalan tanah yang rusak parah dan berlumpur. - Jembatan yang ada terbuat dari kayu bulat yang disusun lalu ditimbun tanah. Belum ada jembatan yang terbuat dari beton atau kerangka baja seperti layaknya jembatan permanen. - Ada beberapa desa yang belum memiliki akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda dua dan empat, seperti desa Wa Yagung, Bungayan dan Pa Raye di Kecamatan Krayan Timur, sedangkan di Krayan (induk) masih ada 2 desa yang belum dapat dijangkau kendaraan roda empat yaitu desa Pa Padi dan desa Cinglat.
		Bapak W (Sekdes Wa Yagung) Bapak M (Tokoh masyarakat Bungayan)		- Bahwa untuk mengangkut kebutuhan sembako menuju desa masyarakat menggunakan tenaga kerbau dengan berjalan kaki sekitar 6 jam dengan mendaki dan menuruni gunung sampai di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

				- Bahwa untuk mengevakuasi orang sakit ke Puskesmas Long Bawan masyarakat harus menandu pasien melalui jalan setapak membelah hutan karena tak ada pilihan lain selain dibawa dengan tandu melalui jalur tersebut.
		B (Kabandara Long Bawan)	Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi persoalan minimnya transportasi ke Krayan ?	Bahwa dalam waktu dekat direncanakan bandara Yuvai Semaring Long Bawan akan didarati dengan ATR 42-300 milik maskapai XpressAir dengan kapasitas penumpang 42 orang, mengingat pelayanan penerbangan perintis bersubsidi dengan maskapai Avia Star (jenis twin otter) dan Susi Air (jenis grand caravan) tidak dapat mengimbangi tingginya animo masyarakat menggunakan moda transportasi udara.
6	Pertanian	FG (Petani Beras Adan)	Bagaimana gambaran pertanian di wilayah perbatasan Krayan?	- Dalam 2 tahun terakhir sejak tahun 2017-2018 terjadi peningkatan produksi beras adan. - Hal tersebut disebabkan oleh adanya upaya eksensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah bersama petani. - Upaya ekstensifikasi dilakukan dengan percetakan lahan sawah baru dengan dukungan dari program Dana Desa di setiap desa. - Upaya intensifikasi lahan pertanian dilakukan dengan menjalankan program

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

				tanam *jajar legowo* yang diberi istilah lokal dengan *tibu siri.* Bagi petani yang menjalankan program tersebut terjadi lonjakan hasil panen menjadi 40 sampai 80 persen dari hasil pada tahun sebelumnya di lahan yang sama.
		FG (Camat Krayan Timur)		Terjadi peningkatan luas lahan pertanian di Krayan Timur sebanyak 40 persen dari luas lahan sebelumnya.
		YS (Camat Krayan Barat)		Meskipun hasil panen masyarakat meningkat, tetapi jumlah tersebut tetap belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan rumah tangga petani sepanjang tahun karena habis terjual kepada para pengumpul yang berasal dari Malaysia sekalipun dengan harga yang murah.
7	Tata Ruang	ER (Bappeda Nunukan)	Kondisi Tata Ruang wilayah perbatasan Krayan	Pola Ruang wilayah Krayan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan termasuk dalam Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.
		E (Kabag Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan)		Berdasarkan Perpres 31 Tahun 2015 Krayan ditetapkan sebagai kawasan perbatasan darat dengan memiliki beberapa kawasan di dalamnya sebagai Zona Lindung 1 (L1) dan Zona Budidaya 1 (B1)
		Bapak RL (Kepala Adat Besar Krayan	Apa pendapat Bapak tentang status kawasan hutan di Krayan ?	- Krayan sebagai Kawasan Lindung dengan Taman Nasional, sampai saat ini masih

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

		Darat) dan Bapak IS (Kepala Adat Besar Krayan Barat)		menjadi polemik di masyarakat karena belum jelasnya batas-batas definitif antara Taman Nasional dengan hak ulayat dan perorangan masyarakat adat. - Masih ada keragu-raguan masyarakat adat menerima pemetaan tata batas sementara untuk penataan batas definitif tersebut karena masih ada pro dan kontra di masyarakat tentang penolakan dan dukungan terhadap status Taman Nasional di Krayan.
8	Pendidikan	T (Kepala SDN 009)	Berapa jumlah peserta UASBN dalam beberapa waktu terakhir ?	- Jumlah rata-rata peserta UASBN setiap tahunnya sebanyak 10 orang siswa. - Jumlah rata-rata peserta UASBN tersebut merupakan jumlah murid masuk sekolah sejak awal, dengan angka putus sekolah atau pindah hampir tidak ada.
9	Fungsi strategis Krayan	S (Sekda Kab. Nunukan)		- Fungsi strategis wilayah Krayan terletak pada letak geografisnya di wilayah Utara Kalimantan, terutama dalam letaknya yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, yaitu Long Midang dengan Ba Kelalan (distrik Lawas) dan negara bagian Sabah, yaitu Pa Pani dengan Long Pasia di Sabah. - Krayan juga mudah dijangkau dari Brunei Darussalam melalui jalur Sarawak dan akan lebih efektif lagi apabila telah terhubung dengan jalan perbatasan Long Bawan – Pa Betung – Pa Pani – Batas Negara melalui

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

				pintu imigrasi Long Pasia, Sabah Malaysia. - Di sisi Indonesia tepatnya di Kecamatan Krayan Tengah, berbatasan dengan Kabupaten Malinau sebagai pintu distribusi logistik dari dalam negeri. - Dengan posisi demikian Krayan memiliki fungsi strategis sebagai poros segi tiga darat di ujung darat Kalimantan Utara dalam konteks pengembangan ekonomi dan pembangunan kawasan perbatasan antar tiga negara.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka